

Bidang Humaniora

**LAPORAN**  
**HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH II**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**



**TEMA: PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN**

**JUDUL PENELITIAN:**

**PROBLEMATIKA KENDALA PEMEROLEHAN INFORMASI**  
**VERBAL SEPUTAR *ISSUE GLOBAL WARMING* BAGI**  
**MASYARAKAT *MONOLINGUAL* SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN**  
**BOJONEGORO DAN TUBAN**

**Nama Peneliti dan Anggota:**

Moch. Jalal, S.S., M.Hum.

Karnaji, S.Sos., M.Si.

Listiyono Santoso, S.S., M.Hum

**Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen**  
**Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat perjanjian Pelaksanaan Hibah**  
**Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor:**  
**300/SP2H/PP/DP2M/Vii/2009, Tanggal 30 Juni 2009**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**DESEMBER, 2009**

KKB  
KF-2  
LP.199/110  
Jal  
P

Bidang Humaniora

**LAPORAN**  
**HIBAH KOMPETITIF PENELITIAN SESUAI PRIORITAS NASIONAL BATCH II**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**TEMA: PERUBAHAN IKLIM DAN LINGKUNGAN**

**JUDUL PENELITIAN:**

**PROBLEMATIKA KENDALA PEMEROLEHAN INFORMASI**  
**VERBAL SEPUTAR *ISSUE GLOBAL WARMING* BAGI**  
**MASYARAKAT MONOLINGUAL SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN**  
**BOJONEGORO DAN TUBAN**

**Nama Peneliti dan Anggota:**  
Moch. Jalal, S.S., M.Hum.  
Karnaji, S.Sos., M.Si.  
Listiyono Santoso, S.S., M.Hum

**Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen**  
**Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat perjanjian Pelaksanaan Hibah**  
**Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor:**  
**300/SP2H/PP/DP2M/VII/2009, Tanggal 30 Juni 2009**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**DESEMBER, 2009**

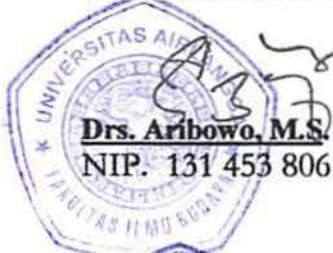
## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : PROBLEMATIKA KENDALA PEMEROLEHAN INFORMASI VERBAL SEPUTAR *ISSUE GLOBAL WARMING*, BAGI MASYARAKAT *MONOLINGUAL* SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN BOJONEGORO DAN TUBAN
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Moch. Jalal, S.S.,M.Hum.
  - b. Jenis Kelamin : L
  - c. NIP : 132161180
  - d. Pangkat/Golongan : IIID/Penata Tingkat I
  - e. Jabatan : Lektor Kepala
  - f. Bidang keahlian : Sociolinguistik
  - g. Fakultas/Jurusan : FIB/ Sastra Indonesia
  - h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
  - i. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Listiyono Santoso	Filsafat dan Kebudayaan	Sastra Indonesia, FIB	Unair
2	Karnaji	Sosiologi	Sosiologi, Fisip	Unair

3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 2 (dua) tahun
  - b. Biaya yang diusulkan : Rp 100.000.000,-
  - c. Biaya yang disetujui tahun I : Rp 96.000.000,-

Mengetahui:  
Dekan Fak. Ilmu Budaya



Surabaya, 1 Desember 2009  
Ketua Peneliti,

**Moch. Jalal, S.S.,M.Hum.**  
NIP. 132 161 180

Mengetahui:  
Ketua LPPM Universitas Airlangga,



## KATA PENGANTAR

Penelitian dengan judul “Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar *Issue Global Warming* Bagi Masyarakat *Monolingual* Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro Dan Tuban” ini merupakan kajian yang dilakukan peneliti terhadap masalah pemahaman masyarakat tamping yang hidup di sekitar hutan terhadap *issue* pelestarian lingkungan hidup dan *global warming*. Penelitian ini dapat selesai sesuai rencana tentunya atas bantuan beberapa pihak yang telah mempermudah segala urusan mulai dari perizinan, pengumpulan data, sampai pada penulisan laporan. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Dikti yang telah mendanai pelaksanaan penelitian ini
2. LPPM Universitas Airlangga yang telah memberikan rekomendasi dan melaksanakan pengelolaan penelitian ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya, atas izin dan segala dukungannya terhadap pelaksanaan penelitian ini.
4. Bupati, Camat, serta pejabat terkait di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yang telah memberikan izin dan mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data.
5. Pejabat Perhutani di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban yang telah bersedia diwawancarai.
6. Pada para mahasiswa FIB yang telah banyak membantu selama proses pengumpulan data dan tabulasi data.

**Akhirnya peneliti hanya bisa berharap, mudah-mudahan hasil peneitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang sedang merencanakan program rehabilitasi lingkungan, khususnya lingkungan hutan.**

**Surabaya, 1 Desember 2009**

**Peneliti**



## RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian yang berjudul "Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar *Issue Global Warming*, bagi Masyarakat *Monolingual* Sekitar Hutan Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban" ini mencoba melihat realitas kesenjangan perolehan informasi penting terkait dengan persoalan krusial, yaitu kelestarian lingkungan hidup dan *Global Warming*. Kenyataan yang ada sekarang, bahwa *Issue* global mengenai pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup maupun bagaimana upaya meredam pemanasan global yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini bahkan belum menyentuh dalam wacana pengetahuan banyak kalangan masyarakat monolingual sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Padahal kelompok mereka ini merupakan orang-orang yang bersentuhan langsung dengan ekologi alam. Apabila mendapatkan informasi yang benar mengenai persoalan kelestarian lingkungan hidup dan *global warming*, tentu mereka merupakan lapisan potensial yang dapat menjaga kelestarian ekologi hutan di sekitar kehidupan mereka. Sebaliknya, kelompok tersebut justru potensial menjadi perusak ekologi hutan serta andil dalam terjadinya proses pemanasan global, jika informasi seputar persoalan tersebut tidak mereka peroleh dengan benar dan memadai.

Sasaran penelitian ini adalah berbagai kalangan masyarakat monolingual sekitar hutan yang tersebar di sepanjang areal hutan jati di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Dari hasil kajian ini diketahui bahwa bahwa media maupun cara paling efektif yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming* bagi masyarakat *monolingual* yang tinggal di sekitar hutan adalah bukan dalam bentuk sekedar informasi melalui media tertentu maupun sosialisasi saja. Cara yang paling efektif dan terbukti berhasil adalah melalui kegiatan-kegiatan kongkrit yang melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas pelestarian hutan. Sebagai contoh adalah melalui program kemitraan dengan pihak Pertutani dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama.

## DAFTAR ISI

### A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN DAN SUMMARY .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Rumusan Masalah .....	5
BAB II STUDI PUSTAKA .....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	10
3.1 Tujuan Penelitian .....	11
3.2 Manfaat Penelitian .....	15
BAB IV METODE PENELITIAN .....	20
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	20
5.1 Kondisi Geografis, Pemerintahan, Kependudukan, dan Keputusan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban .....	20
5.2 Pemahaman Masyarakat Terkait <i>Issue</i> Seputar Lingkungan Hidup dan <i>Global Warming</i> .....	25
5.3. Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Persoalan Pelestarian Lingkungan dan <i>Global Warming</i> .....	45
5.4. Potensi dan peran Serta lembaga-lembaga sosial lokal .....	57
5.5. Model Alternatif dalam Pelestarian Lingkungan dan <i>Global Warming</i> .....	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
6.1 KESIMPULAN .....	72
6.2 SARAN .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1. Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008, hal. 22
2. Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Di Kabupaten Tuban Tahun 2008, hal. 23
3. Pendidikan Terakhir, hal. 26
4. Pengenalan Istilah Pemanasan Global/Global Warming, hal. 27
5. Pemahaman Fungsi dan Peranan hutan, hal. 29
6. Pemahaman Permasalahan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Khususnya Hutan, hal. 31
7. Pemahaman Tentang Peran Serta masyarakat Dalam Memelihara Lingkungan Hutan, hal. 33
8. Pemahaman tentang Pentingnya Kesadaran Masalah Pemeliharaan Lingkungan Hidup, hal. 34
9. Pemahaman tentang Batasan yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan dalam Pemanfaatan Hutan, hal. 36
10. Aktivitas Komersial yang Selama ini Bersinggungan dengan Hutan, hal. 38
11. Aktivitas yang berperan dalam Pelestarian Lingkungan Hutan, hal. 42
12. Aktivitas yang Berpotensi Merusak Lingkungan hutan, hal. 43
13. Bahasa Komunikasi, hal. 47
14. Pemahaman Terhadap Bahasa Indonesia, hal. 48
15. Kondisi Kompetensi Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia, hal. 49
16. Sarana Informasi Elektronik Sejenis Radio/Televisi yang Dimiliki, hal. 50
17. Sarana Informasi Nonelektronik Koran/Majalah yang Dimiliki, hal. 51
18. Sarana Informasi Elektronik/Nonelektronik yang dapat Menjangkau Informan dalam Memperoleh Informasi (Walaupun bukan Milik Sendiri), hal. 52
19. Deskripsi Pengenalan Istilah Pemanasan Global, hal. 53
20. Peran Media dalam Pemberian Informasi Pelestarian Hutan, hal 53
21. Media yang paling Berperan Mengenai Informasi Pelestarian Hutan, hal. 54



22. **Media yang dianggap Efektif dan Mudah dalam Pemberian Pemahaman untuk Informasi Pelestarian Hutan, hal. 55**
23. **Kendala Pemerolehan Informasi Lewat media (Elektronik/Cetak), hal. 56**
24. **Sarana lain Sebagai Sumber Informasi Pelestarian Lingkungan Hutan, hal. 60**
25. **Sumber Informasi yang Paling Efektif, Mudah Dipahami, dan Sesuai dengan Kondisi pengetahuan dan Kebahasaan Informan, hal 62**
26. **Pekerjaan Pokok, hal. 69**

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1. Area hutan yang digunakan untuk sawah, hal. 37**
- 2. Area hutan yang digunakan untuk pemukiman penduduk, hal. 39**
- 3. Pohon-pohon di hutan yang dekat dengan pemukiman penduduk, hal. 68**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. IZIN KEGIATAN PENELITIAN**
- 2. KUESIONER PENELITIAN**
- 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI**
- 4. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Issue pelestarian lingkungan hidup dan *global warming* merupakan masalah sangat penting yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap issue lingkungan tersebut dapat berdampak pada bagaimana kondisi lingkungan hidup di sekitar mereka. Pemahaman yang memadai serta ditunjang dengan adanya kesadaran yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan hidup, tentu akan berdampak positif pada kelestarian lingkungan. Sebaliknya dengan tidak adanya pemahaman serta kesadaran memadai terhadap lingkungan akan berpotensi terhadap makin buruknya kondisi lingkungan hidup di sekitar masyarakat tersebut berada.

Rusaknya lingkungan hidup di area tertentu ternyata tidak hanya berdampak buruk di sekitar area tersebut. Imbas yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan di sebuah wilayah ternyata dapat menjangkau area yang sangat luas bahkan dapat bersifat mengglobal. Hal semacam itulah yang saat ini menimbulkan masalah *global warming* atau pemanasan global yang dirasakan oleh hampir masyarakat di seluruh dunia sebagai imbas dari persoalan rusaknya lingkungan hidup, terutama hutan di belahan negara tertentu.

Hutan memiliki peran yang sangat vital dalam kelangsungan hidup umat manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Bahkan keberadaan

hutan juga dapat mempengaruhi iklim serta kondisi lingkungan yang berada di area sekitarnya. Termasuk dalam hal ini harus diperhatikan fungsi penting hutan, antara lain: sebagai sumber air, tempat konservasi hewan dan tumbuhan, menyimpan berbagai sumberdaya berasal dari pohon-pohon yang tumbuh di dalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kehidupan manusia, dan lain-lain. Sumber daya hutan ini terutama sangat menjadi tumpuan serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitar area hutan.

Masyarakat *monolingual* sekitar hutan adalah kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan relatif hanya memiliki kompetensi komunikasi 1 (satu) sistem bahasa saja dalam aktivitas komunikasi mereka. Dari aspek sosial ekonomi, kebanyakan masyarakat sekitar hutan merupakan kelompok masyarakat marginal yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta memiliki banyak keterbatasan terhadap berbagai fasilitas kehidupan modern. Akibat dari berbagai keterbatasan tersebut seringkali membuat semua aspek kehidupan mereka menjadi tertinggal.

Di bidang informasi pun mereka seringkali tertinggal oleh info penting dan terbaru. Apalagi informasi seputar *issue global warming* yang hanya disebarkan melalui media modern dan relatif hanya menjadi konsumsi masyarakat modern di perkotaan. Padahal informasi tersebut sebenarnya sangat penting bagi kehidupan mereka, juga bagi kelestarian ekologi hutan yang ada di sekitar mereka. Keberadaan

masyarakat sekitar hutan sangat potensial dalam membantu kelestarian lingkungan di sekitar mereka apabila memiliki pemahaman yang benar mengenai issue lingkungan hidup dan *global warming*. Sebaliknya, akibat dari tidak memadainya informasi yang mereka pahami tentang *issue* tersebut, tidak menutup kemungkinan justru merekalah yang akhirnya ikut andil besar dalam proses perusakan ekologi hutan serta menambah buruknya situasi *global warming*.

Di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, serta wilayah lain di Provinsi Jawa Timur, masyarakat sekitar hutan atau yang dikenal dengan istilah masyarakat tamping sebenarnya merupakan kelompok masyarakat yang memiliki posisi penting dalam pelestarian hutan. Jika diberdayakan dengan benar, keberadaan mereka dapat menjadi aset untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian hutan. Namun di satu sisi juga terdapat kenyataan jika sebagian masyarakat tamping adakalanya kurang memiliki kepedulian untuk berperan secara aktif dalam memelihara kelestarian hutan di sekitar mereka. Sebaliknya, mereka hanya sering memanfaatkan berbagai potensi hutan seperti, kayu, dedaunan, serta berbagai flora dan fauna yang memiliki nilai secara ekonomis. Kenyataan itu menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman masyarakat sekitar hutan terhadap *issue* pelestarian lingkungan dan *global warming*.

Untuk itu kajian terhadap problematika pemahaman masyarakat *monolingual* sekitar hutan terkait dengan *issue* lingkungan hidup dan

*global warming* di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini penting untuk dilakukan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pada anggaran tahun pertama ini permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terkait dengan *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming*?
2. Bagaimanakah problematika kendala pemerolehan informasi verbal seputar persoalan pelestarian lingkungan dan *global warming* yang dihadapi masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban?
3. Bagaimanakah potensi lembaga-lembaga sosial lokal terkait dengan kemungkinan peransertanya sebagai media efektif dalam menginformasikan *issue* lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban?
4. Bagaimanakah model alternatif bagi upaya efektif dalam memberikan informasi atau pemahaman yang benar mengenai *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban?



## BAB II STUDI PUSTAKA

Menurut Crystal (1992:360), masyarakat monolingual adalah masyarakat yang hanya memiliki satu sistem bahasa saja untuk aktivitas komunikasi verbalnya. Konsep memiliki menurut definisi Crystal ini mengacu pada kepemilikan kompetensi komunikatif, yaitu memiliki pemahaman terhadap sistem bahasa dan sekaligus dapat menggunakan bahasa tersebut secara aktif untuk berkomunikasi. Pada umumnya yang menjadi kompetensi komunikatif pada masyarakat monolingual adalah bahasa ibu, yaitu bahasa yang pertama kali dipelajari dan dipergunakan.

Kelompok masyarakat monolingual hanya mungkin ditemukan pada sebuah komunitas yang memiliki struktur sosial relatif homogen, serta kurang memiliki mobilitas sosial, budaya, maupun ekonomi. Pada situasi sekarang ini kondisi monolingual hanya mungkin terjadi pada masyarakat marginal yang relatif terisolasi. Kemungkinan kedua, terjadi pada kelompok masyarakat yang selama hidupnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal cukup memadai.

Data terakhir menunjukkan, bahwa dari sebanyak 37.070.731 jiwa seluruh jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur, tercatat masih terdapat sebanyak 3.636.816 penduduk usia di atas 15 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Sementara itu di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dari 1.238.811 jiwa jumlah penduduk yang ada, tercatat 141.934 orang tidak sekolah. Sedangkan di Kabupaten Tuban,

dari 1.095.795 jiwa tercatat sebesar 113.019 orang yang tidak mengenyam pendidikan formal (Sumber: BPS Jatim, kondisi 19 November 2008).

Realitas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang tidak mengenyam pendidikan formal masih menunjukkan angka yang cukup besar. Keberadaan mereka cenderung berada di wilayah pinggiran atau wilayah pelosok yang kurang terjangkau modernisasi (Suyanto dan karnaji, 2004:67). Kelompok masyarakat ini dapat dipastikan sebagai masyarakat *monolingual* yang memiliki masalah keterbatasan penguasaan bahasa kedua. Di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, kelompok masyarakat *monolingual* banyak ditemukan di wilayah-wilayah sekitar hamparan lahan hutan jati yang sangat luas. Secara sosial, politik, maupun ekonomi, mereka termasuk golongan masyarakat yang penuh dengan keterbatasan, dengan mekanisme survival lebih menggantungkan pada potensi dan kondisi ekologi alam di sekitar mereka.

Di era modern ini penyebaran arus informasi cenderung memanfaatkan sarana dan prasarana modern pula. Media yang paling efektif serta memiliki daya jangkau terhadap masyarakat luas adalah televisi, radio, koran, majalah, serta Internet. Semua media modern tersebut telah terbukti efektif dalam menyebarkan dan mentransformasikan informasi pada masyarakat. Namun hal itu bukan berarti semua lapisan masyarakat akan tersentuh oleh media modern.

Ada dua faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Pertama, tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan sosial dan ekonomi untuk menjangkau media-media modern. Kedua, bahasa yang digunakan dalam media modern belum tentu dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat (Rivers dan Jay, 2004: 15).

Masyarakat sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban pada umumnya merupakan masyarakat monolingual yang hanya dapat memahami bahasa Jawa. Saat ini informasi yang disampaikan melalui media-media modern adalah berbahasa nasional atau internasional. Memang akhir-akhir ini muncul TV lokal yang memiliki segmen acara berbahasa Jawa, termasuk dalam menyampaikan informasi. Namun karena sinyal yang kurang kuat, ditambah lagi lokasi masyarakat sekitar hutan ini memang relatif jauh dari pusat kota, maka bagi yang terjangkau televisi, mereka hanya dapat menikmati *channel* TV tertentu saja. Sementara itu sebagian yang lain mungkin saja sama sekali tidak dapat menikmati siaran TV. Bagi kelompok masyarakat seperti mereka, pesawat TV masih merupakan barang mewah yang belum tentu dapat dijangkau oleh setiap orang.

Menyampaikan suatu maksud atau informasi verbal kepada orang lain harus selalu memperhatikan kesesuaian sarana verbal yang dimiliki oleh pengirim maupun penerima pesan. Kesenjangan kepemilikan sarana verbal yang tidak sejajar berpotensi dapat menyebabkan kegagalan dalam proses transformasi informasi. Perlu adanya strategi-strategi

komunikasi tertentu guna mengefektifkan sebuah usaha transformasi informasi. Pringgawidagdo (2009) menyatakan, penyampai informasi harus selalu memperhatikan aspek latar belakang pendidikan, politik, sosial budaya, serta bahasa dari masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penginformasiannya.

Dalam kasus kurangnya pemahaman *issue global warming* yang dialami masyarakat *monolingual* sekitar hutan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini dipastikan karena sebagai akibat dari tidak adanya informasi memadai yang menggunakan bahasa yang sesuai dengan *verbal repertoir* mereka. Atau bisa jadi, informasi seputar *issue* tersebut memang sama sekali belum pernah disampaikan pada masyarakat yang relatif terisolasi ini.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan terhadap kelompok masyarakat marginal di wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil, bahwa masyarakat yang berada di wilayah terpencil memang rentan untuk tidak memahami berbagai sistem nilai ataupun pengetahuan baru. Faktor yang menjadi penyebab kondisi itu antara lain adalah sebagai akibat dari adanya berbagai kesenjangan, baik itu aspek sosial, budaya, maupun teknologi. Namun fakta tersebut bukan berarti sebuah harga mati yang memvonis bahwa nilai atau pengetahuan baru tidak mungkin dapat masuk pada kehidupan kelompok masyarakat marginal tersebut. Menurut Suyanto dan Jalal (2001) cara efektif untuk dapat melakukan penetrasi program-program tertentu pada masyarakat lokal di Provinsi

**Jawa Timur, yaitu melalui ranah lembaga adat serta berbagai potensi lokalitas masyarakat tersebut.**

### **BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Secara khusus pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terkait dengan *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming*.
2. Menemukan pengetahuan analitik tentang berbagai problematika kendala pemerolehan informasi verbal seputar persoalan pelestarian lingkungan dan *global warming* yang dihadapi masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
3. Mencoba menemukan berbagai potensi lembaga-lembaga sosial lokal terkait dengan kemungkinan peransertanya sebagai media efektif dalam menginformasikan *issue* lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.
4. Mencoba mencari aspek aplikatif berdasar atas temuan riset sebagai model alternatif bagi upaya efektif dalam memberikan informasi atau pemahaman yang benar mengenai *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

### **3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul “*Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban*” ini sangat penting dilakukan. Selain dapat dipergunakan sebagai acuan bidang humaniora dalam program pelestarian lingkungan hidup dan penanganan masalah *Global Warming*, dari sisi keilmuan, kajian semacam ini merupakan tuntutan pengembangan kajian humaniora khususnya linguistik terapan untuk lebih dapat bersinergi dengan persoalan-persoalan lain di luar aspek internal bahasa.

Saat ini kerusakan ekologi hutan di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban sudah berada pada ambang batas kritis. Sebelum era 90-an, hamparan hutan jati yang luas dan rimbun di wilayah tersebut mampu dijadikan sebagai peredam polusi udara, banjir, tanah longsor, serta menjadi alternatif rekreasi murah bagi warga. Beraneka flora dan fauna pun masih menjadikan area hutan yang dikelola oleh Perhutani itu sebagai habitat hidup mereka. Bahkan pada era tersebut, hutan juga mampu dijadikan sebagai sandaran ekonomi bagi masyarakat tamping yang hidup di area sekitar hutan. Mereka memanfaatkan pohon-pohon, dedaunan, serta potensi flora fauna lain yang bernilai ekonomis. Lahan-lahan hutan juga bermanfaat untuk kelangsungan aktivitas ekonomi mereka seperti menggembala ternak atau menanam tanaman tertentu sebagai kegiatan sampingan.



Sekarang ini jangankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, jumlah pohon jati yang masih berdiri tegak di areal hutan wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban dapat dihitung dengan jari. Rusaknya areal hutan itu sebagai akibat dari pemanfaatan yang membabi buta dan tidak berorientasi pada kelestarian hutan oleh masyarakat sekitar, juga pembalakan liar masal tahun 1999 sebagai buntut dari eforia reformasi yang *kebablasan*. (Suyanto dan Ariadi, 2009:23).

Pelestarian kembali lingkungan hidup termasuk dalam hal ini ekologi hutan adalah sebuah keharusan. Pentingnya usaha rehabilitasi ekologi alam tersebut dapat memiliki manfaat serta tujuan yang sangat kompleks. Pertama, sebagai upaya menyelamatkan flora dan fauna yang berada di ambang kepunahan. Kedua, dapat membantu kualitas kelangsungan hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah hutan. Ketiga, sebagai usaha untuk membantu meredam gejala *global warming* yang melanda seluruh dunia.

Program penanganan rehabilitasi lingkungan hidup dan *global warming* sebenarnya tidak hanya terbatas pada persoalan membenahi konservasi alam semata. Dengan kata lain, pembenahan atau pelestarian ekologi alam hanyalah sebagian *action* dari usaha pelestarian lingkungan. Bagian lain yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan berbagai aspek perilaku sosial kemasyarakatan yang bersentuhan dengan ekologi lingkungan tersebut. Bagaimanapun juga perilaku masyarakat terhadap sebuah lingkungan alam akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup

ekologi alam tersebut. Apabila masyarakat sudah benar dalam memperlakukan alam di sekitarnya, niscaya alam tersebut akan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung merusak, maka di kemudian hari semua tindakan negatif tersebut akan menjadi bumerang bencana yang akan menimpa pada masyarakat itu juga.

Perilaku yang benar ataupun salah akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang benar lewat informasi-informasi yang diterima masyarakat. Sebagai akibat dari berbagai situasi sosial, politik, serta ekonomi yang kurang kondusif, besar kemungkinan bahwa arus informasi yang memadai terkait dengan *issue* lingkungan hidup dan *global warming* kurang dapat mereka terima. Hal itu menyebabkan mereka kurang bijak dan benar dalam memperlakukan ekologi hutan di sekitarnya. Untuk itu harus dipastikan, bahwa nantinya semua lapisan masyarakat sekitar hutan, terutama bagi mereka yang memiliki kendala keterbatasan bahasa, harus menerima informasi yang memadai seputar *issue* lingkungan dan *global warming*.

Dengan demikian, kajian tentang problematika kendala pemerolehan informasi verbal seputar *issue global warming*, bagi masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini, akan sangat membantu program rehabilitasi hutan yang sedang dicanangkan pemerintah, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Selain itu usaha pelestarian lingkungan hidup terkait dengan

**persoalan pemanasan global perlu mendapatkan kontribusi dari bidang humaniora, sehingga hasil kajian yang diusulkan ini dapat disinergikan dengan program pelestarian lingkungan dan persoalan *global warming*.**

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

Supaya memperoleh hasil yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka tahapan kegiatan dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, melakukan *mapping* untuk menyusun peta persebaran dan profil sosial masyarakat *monolingual* sekitar hutan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Kedua, melakukan kajian langsung di lapangan mengenai problematika kendala pemerolehan informasi seputar *issue* lingkungan hidup dan *global warming*. Sedangkan tahapan ketiga adalah menyusun model upaya efektif dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Proses pengumpulan data dalam kegiatan ini dilakukan melalui empat cara sebagai berikut. Pertama, mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai kondisi sektor kehutanan dan masyarakat di sekitarnya, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Data sekunder tersebut digali dari BPS, survei-survei lokal, dan data dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian lainnya. Informasi seputar hutan dan struktur sosial masyarakat di sekitarnya di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban ini penting sebagai bahan untuk melakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi masyarakat *monolingual* di sekitar hutan.

Kedua, melakukan *review* terhadap hasil-hasil studi mengenai persoalan kesenjangan komunikasi, media massa modern, serta perilaku sosial kultural masyarakat tamping sekitar hutan. *Review* terhadap hasil penelitian ini penting dilakukan, selain untuk kerangka acuan analisis, juga sekaligus untuk acuan memahami persoalan perilaku sosial kultural masyarakat *monolingual* sekitar hutan secara teoritik.

Ketiga, melakukan penggalan data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi pemahaman serta problematika kendala pemerolehan informasi verbal seputar *issue* lingkungan dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Pada kegiatan penggalan data primer ini, jumlah masyarakat yang diwawancarai sebanyak 250 orang yang secara metodologis diasumsikan bisa mewakili karakteristik masyarakat *monolingual* sekitar hutan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Lokasi dan masyarakat yang diwawancarai dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan aspek lokasi kawasan tempat tinggal, struktur sosial masyarakat, serta aspek demografis secara proporsional.

Keempat, melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan tokoh masyarakat, dinas terkait, serta sejumlah pakar dan peneliti dari Perguruan Tinggi, guna membahas problematika yang ada. FGD ini penting dilakukan, selain untuk kepentingan melakukan konfirmasi data yang sudah berhasil dikumpulkan, juga sekaligus untuk memetakan

berbagai situasi problematik mengenai kendala-kendala yang dihadapi masyarakat monolingual sekitar hutan dalam mendapatkan pemahaman yang benar dan memadai tentang issue seputar kelestarian lingkungan hutan dan *global warming*.

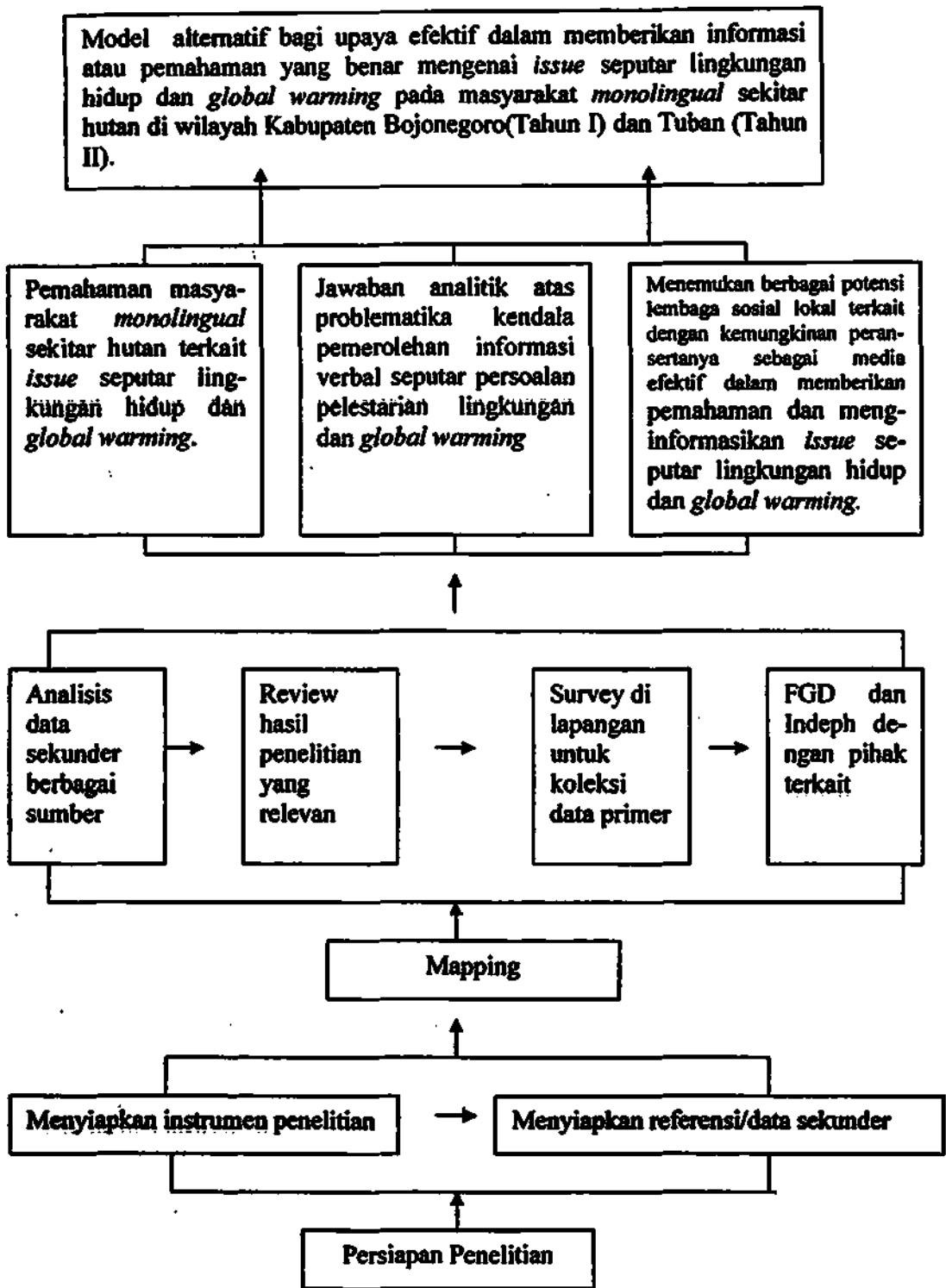
Secara teknis, analisis data yang diaplikasikan dalam kegiatan ini lebih banyak bersifat gabungan antara kajian kuantitatif dan kualitatif. Kajian kuantitatif hanya digunakan untuk melihat frekuensi dari gejala-gejala yang ditemukan di lapangan dengan cara menghitung jumlah kecenderungan serta persentasinya. Model analisis kualitatif terutama dilakukan terhadap uraian atas data-data primer yang diperoleh dari hasil observasi seputar kehidupan sosial masyarakat *monolingual* sekitar hutan, wawancara mendalam (*depth interview*), serta dari hasil kegiatan FGD. Adapun cara penerapan analisis kualitatif dilakukan dengan membuat katagorisasi serta kompilasi data yang selanjutnya diinterpretasi dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian (*essay*) disertai kutipan-kutipan dari sumber data. Untuk lebih memberikan makna terhadap hasil analisis, akan dilakukan interpretasi teoritik baik yang bersifat internal maupun eksternal, sejauh memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

Akhirnya, dari hasil analisis serta interpretasi teoritik terhadap data-data primer maupun sekunder yang ada akan dijabarkan temuan-temuan sebagai berikut. 1) Pemahaman masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban terkait dengan *issue*

seputar lingkungan hidup dan *global warming*. 2) Jawaban analitik atas problematika kendala pemerolehan informasi verbal seputar persoalan pelestarian lingkungan dan *global warming*. 3) Menemukan berbagai potensi lembaga-lembaga sosial lokal terkait dengan kemungkinan peransertanya sebagai media efektif dalam memberikan pemahaman dan menginformasikan *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming*.

Berdasarkan 3 temuan pokok tersebut akan disusun model alternatif bagi upaya efektif dalam memberikan informasi atau pemahaman yang benar mengenai *issue* seputar lingkungan hidup dan *global warming* pada masyarakat *monolingual* sekitar hutan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.





## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1. Kondisi Geografis, Pemerintahan, Kependudukan, dan Kehutanan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban**

Kabupaten Bojonegoro, secara geografis mempunyai luas wilayah lebih dari 2 ribu kilo meter persegi –berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Ngawi di bagian Selatan, dengan Kabupaten Lamongan di bagian Timur, di bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, dan bagian Barat bersebelahan dengan wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari dataran rendah yang dialiri sungai Bengawan Solo, sedangkan bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sekitar kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Dilihat secara keseluruhan, 81,29 persen dari luas wilayah kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian 25 meter atau lebih, dan yang lainnya sekitar 18,71 persen berada pada ketinggian di bawah 25 meter. Luas wilayah dengan kemiringan kurang dari 2 persen merupakan yang terluas, kemudian dengan kemiringan antara 2 sampai dengan 14,99 persen (36,16 persen) dan sisanya (8,74 persen) kemiringannya di atas 15 persen. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, perkebunan 0,26 persen, tanah kering 22,42 persen sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Dengan demikian dapat dilihat bahwa seharusnya wilayah

Kabupaten Bojonegoro memiliki lahan hutan yang lebih luas jika dibandingkan dengan lahan lainnya.

Sedangkan Kabupaten Tuban secara geografis terletak pada 111,30 – 112,35 derajat bujur timur dan 6,40 – 7,18 derajat lintang selatan. Kabupaten Tuban mempunyai luas wilayah daratan 1.839,94 kilo meter persegi, dengan jumlah total area hutan seluas 41.346,24 hektar. Area hutan di wilayah Kabupaten Tuban ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2004 masih tercatat seluas 56.551,8 hektar, Tahun 2005 seluas 56.168 hektar, Tahun 2006 seluas 37.516,7 hektar, sedangkan pada kondisi sekarang mengalami sedikit peningkatan lagi, yaitu seluas 41.346,24 hektar (Sumber: PT. Perhutani)

Wilayah Kabupaten Tuban berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di bagian selatan, dengan Kabupaten Lamongan di bagian Timur, dengan Pripinsi Jawa Tengah di bagian barat, serta dengan Laut Jawa di bagian Utara. Sedangkan area laut yang tercatat sebagai wilayah Kabupaten Tuban adalah seluas 22.608 kilometer persegi.

Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah Kecamatan Montong, yaitu 8,04 persen dari total luas wilayah di Kabupaten Tuban. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tuban, yaitu 21.29 kilometer persegi, atau hanya 1,16 dari total luas wilayah di Kabupaten Tuban.

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdiri atas 27 kecamatan dan 430 desa/kelurahan. Dari 430 desa/kelurahan tersebut

sebanyak 287 desa/kelurahan merupakan desa/kelurahan swadaya dan sisanya (143 desa/kelurahan) adalah Swakarya Mantap II. Desa/kelurahan yang menyandang predikat sebagai desa swadaya tersebut, 5,35 persen di antaranya tercatat sebagai desa swadaya mula, dan sisanya tercatat sebagai desa swadaya madya. Sedangkan desa/kelurahan dengan predikat swakarya, sebanyak 3,49 persennya termasuk dalam kategori swakarya madya.

**Tabel 1**  
**Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Di Kabupaten Bojonegoro**  
**Tahun 2008**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun
1. Ngraho	16	58
2. Margomulyo	6	41
3. Tambakrejo	18	65
4. Ngambon	5	16
5. Sekar	6	39
6. Bubutan	5	17
7. Gondang	7	32
8. Temayang	14	36
9. Sugihwaras	17	53
10. Kedungadem	23	96
11. Kepohbaru	25	68
12. Baureno	25	88
13. Kanor	25	59
14. Sumberejo	26	99
15. Balen	23	69
16. Sukosewu	14	41
17. Kapas	21	36
18. Bojonegoro	18	16
19. Trucuk	12	25
20. Dander	16	51
21. Ngasem	23	73
22. Kalitidu	24	67
23. Malo	20	51
24. Purwosari	12	32
25. Padangan	16	37
26. Kasiman	10	31
27. Kedewan	5	12

Sumber: Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2008

Kecamatan yang paling banyak jumlah desanya adalah kecamatan Sumberejo, yaitu membawahi sebanyak 26 desa. Kecamatan Ngambon, Bubulan dan Kedewan memiliki desa yang paling sedikit, yaitu masing-masing 5 desa.

Sedangkan Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan, 311 desa dan 17 kelurahan. Jumlah kelurahan di Kabupaten Tuban tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi sejak Tahun 2006. Hanya tiga kecamatan tercatat yang mempunyai kelurahan, yaitu Kecamatan Tuban (14 kelurahan), Palang (1 kelurahan), dan Semanding (2 kelurahan).

**Tabel 2**  
**Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Di Kabupaten Tuban Tahun 2008**

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun
1. Kenduruan	9	27
2. Bangilan	14	46
3. Senori	12	33
4. Singgahan	12	36
5. Montong	13	47
6. Parengan	18	52
7. Soko	23	57
8. Rengel	16	42
9. Grabagan	11	36
10. Plumpang	18	53
11. Widang	16	46
12. Palang	18/1	52
13. Semanding	15/2	49
14. Tuban	3/14	7
15. Jenu	17	47
16. Merakurak	19	49
17. Kerek	17	46
18. Tambakboyo	18	37
19. Jatirogo	18	50
20. Bancar	24	67

Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka 2008

Penduduk Kabupaten Bojonegoro berdasarkan laporan pada data-data Bojonegoro Dalam Angka kondisi Tahun 2009 disebutkan sebagai berikut. Jumlah penduduk tercatat 1.232.038 orang dan kurang dari 0,01 persennya merupakan warga negara asing (WNA). Komposisi penduduk dari jenis kelamin adalah 49,61 persen laki-laki dan 50,39 persennya adalah perempuan. Dibanding tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar 1,08 persen. Rasio penduduk dari jenis kelamin (sex ratio) berada di bawah angka 100 atau tepatnya adalah 98,78. Namun jika dilihat data tiap kecamatan, ternyata ada 10 kecamatan, yaitu: Ngambon, Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno, Sukosewu, Kapas, Dander, Ngasem, dan Kecamatan Malo yang memiliki sex ratio di atas 100. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Bojonegoro tercatat 541 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan angka kepadatan tertinggi di kecamatan Bojonegoro, yaitu 3.230 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Margomulyo, yaitu hanya sebesar 157 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber: Bojonegoro Dalam Angka, 2008).

Sedangkan di Kabupaten Tuban tercatat berjumlah 1.127.416 jiwa, dengan komposisi laki-laki 555.607 jiwa dan perempuan 571.809 jiwa. Jumlah penduduk berada di Kecamatan Semanding, yaitu 93.703 jiwa dan yang paling sedikit di Kecamatan Kenduruan, yaitu 27.188 jiwa. Kepadatan penduduk di kabupaten Tuban mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 613 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang tercatat paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tuban, yaitu sebesar 3.820 jiwa/km<sup>2</sup> (Sumber: Tuban Dalam Angka, 2008).

## **5.2. Pemahaman Masyarakat Terkait *Issue* Seputar Lingkungan Hidup dan *Global Warming***

Masyarakat yang hidup di pinggiran hutan atau yang dikenal dengan istilah masyarakat tamping, merupakan kelompok masyarakat yang banyak memiliki keterbatasan dalam kehidupan mereka. Kelompok masyarakat ini di wilayah Kabupaten Bojonegoro maupun Tuban, rata-rata bermukim di lokasi yang relatif jauh dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Sebagai akibat dari kondisi tersebut antara masyarakat tamping dan masyarakat pusat kota seringkali memiliki jarak kesenjangan dalam berbagai aspek. Secara sosial mereka mengembangkan pola kehidupan sesuai dengan keterbatasan fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar mereka. Secara ekonomi, arus perputaran uang maupun sektor yang dapat dijadikan sebagai bidang usaha tentu tidak pernah sebanding secara kuantitatif maupun kualitatif dengan kondisi di pusat perkotaan. Di bidang politik pun keberadaan masyarakat tamping ini relatif tidak memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan di kancah politik lokal, regional, apalagi di tingkat nasional.

Masyarakat Tamping juga bukanlah kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan memadai. Dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, masih ditemukan sebanyak 162 responden atau 64,8% yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. Sementara itu 46 responden atau 18,4% sekolah SD atau yang sederajat. Sedangkan yang menyatakan tamat sekolah dasar atau sederajat hanya 42 atau 16,8% saja.



**TABEL 3**  
**PENDIDIKAN TERAKHIR**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Tidak sekolah	162	64,8
2	Tidak tamat Sekolah Dasar	46	18,4
3	Tamat Sekolah Dasar	42	16,8
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 6)

Keterbatasan serupa juga terjadi di sektor pemerolehan arus informasi. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mereka miliki dalam mengakses *issue* penting dan terkini mengenai lingkungan hidup, membuat pemahaman terhadap masalah-masalah terbaru menjadi tertinggal. Hingga saat ini tidak seorang pun dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai menyatakan telah memahami persoalan *global warming*. Jangankan memahami pengertian ataupun deskripsinya, mendengar istilahnya saja mereka menyatakan belum pernah.

Keterbatasan ini menjadikan masyarakat Tamping mengalami kendala dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan isu *global warming*. Kondisi masyarakat Tamping yang berasal dari warga dengan tingkat pendidikan rendah telah menyebabkan rendahnya daya serap mereka terhadap berbagai informasi yang dilakukan oleh orang lain, apalagi dari orang yang berbeda bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa Mataraman, sedangkan bahasa selain itu jarang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kondisi ini menghambat keberterimaan informasi masyarakat Tamping terhadap berbagai peristiwa atau fenomena yang terjadi di dunia, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang *global warming*.

Faktor pendidikan membawa implikasi bagi lemahnya penguasaan bahasa selain bahasa pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari, berbagai istilah yang tidak mereka hadapi dan lakukan setiap hari akan jarang ditemukan, bahkan tidak akan ditemukan. Menjadi wajar jika masyarakat pada kondisi yang demikian mengalami kendala dalam penerimaan informasi pemanasan global. Hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan, bahwa dari sekitar 250 responden yang diberikan pengenalan istilah *global warming* ternyata tidak satupun yang mengetahuinya, minimal akrab dengan istilah ini.

**TABEL 4**  
**PENGENALAN ISTILAH PEMANASAN GLOBAL/GLOBAL WARMING**

NO	PENGENALAN	JUMLAH	%
1	Pernah	-	
2	Tidak pernah	250	100
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 26)

Realitas ini memang cukup memprihatinkan. Ditengah gencarnya masyarakat dunia mensosialisasikan fenomena bahaya pemanasan global, ternyata masih terdapat sejumlah komunitas yang tidak mengenal istilah tersebut. Bagaimana mereka bisa diajak ikut terlibat dalam mengantisipasi bahaya pemanasan global kalau pemakaian istilah saja belum akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak hal, sebuah istilah yang sudah menjadi pembicaraan sehari-hari biasanya mendapat respon positif dari masyarakat tersebut. Respon itu berangkat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap isu yang berkembang.

Istilah pemanasan global atau *global warming* merupakan terminologi baru yang menjadi konsumsi publik akademisi atau kelompok masyarakat yang terjangkau oleh sarana informasi modern. Di perkotaan pun belum tentu semua kalangan masyarakat dapat paham terhadap istilah yang awalnya berkembang di dunia barat tersebut. Oleh sebab itu dengan berbagai keterbatasannya wajar jika masyarakat Tamping menyatakan paham dan pernah mendengar istilah tersebut.

Tidak pahamnya masyarakat tamping dengan istilah pemanasan global atau *global warming* bukan berarti mereka sama sekali tidak memiliki pengetahuan seputar *issue* lingkungan di sekitar mereka. Mereka memang kurang paham pada fungsi-fungsi hutan seperti: bahwa keberadaan hutan dapat mempengaruhi iklim dunia; bahwa keberadaan hutan dapat meredam polusi udara akibat asap pabrik atau kendaraan bermotor; bahwa kuantitas dan kualitas hutan nantinya dapat mempengaruhi lapisan ozon yang melindungi bumi dari sengatan sinar matahari secara berlebihan. Masyarakat tamping pada dasarnya telah mengembangkan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat hutan dari sisi yang lain.

Walaupun tidak diperoleh melalui media informasi atau lewat jalur pendidikan, dengan bekal *common sense* yang dimiliki, mereka ternyata juga mempunyai pemahaman terhadap lingkungan hutan berdasarkan hasil pembelajaran mereka sendiri. Misalnya pemahaman mengenai: (1) keberadaan hutan sangat berpengaruh terhadap kondisi sumber air di

sekitar mereka, (2) keberadaan hutan sebagai sarana perlindungan pemukiman mereka dari angin kencang dan badai, (3) sebagian masyarakat sangat tergantung pada berbagai sumber daya terkait dengan keberadaan hutan, misalnya memanfaatkan ranting-ranting atau reneck kayu jati, mengambil daun-daun jati, memanfaatkan potensi fauna dan flora yang hidup di lingkungan hutan, dan lain-lain, (4) hutan sangat bermanfaat dalam mencegah terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. Terkait dengan pemahaman fungsi hutan seperti yang telah disebutkan tadi, dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai hanya 36 atau 14,4% responden yang tidak paham. Sementara itu 61 atau 24,4% responden kurang paham. Sedangkan 102 atau 40,8% dinyatakan cukup paham, serta 51 atau 20,4 responden sangat paham.

**TABEL 5**  
**PEMAHAMAN FUNGSI DAN PERANAN HUTAN**

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat paham	51	51
2	Cukup paham	102	102
3	Kurang paham	61	61
4	Tidak paham	36	36
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 17)

Data di atas menyebutkan bahwa pemahaman terhadap fungsi dan peranan hutan memang cukup baik. Masyarakat Tamping memiliki kearifan local (*local wisdom*) dalam mengelola fungsi dan peranan hutan. Kearifan local itu diperoleh dari warisan turun temurun sebagai sebuah pengetahuan berdasar pengalaman kehidupannya. Bagi masyarakat Tamping, hutan bukan sekedar kumpulan pohon yang bermakna

fisik/benda, melainkan hutan memiliki makna strategis sebagai penopang kehidupan sosial ekonomi mereka. Itulah sebabnya, bagi masyarakat tamping, fungsi hutan memiliki makna bagi ketersediaan sumber kehidupan masyarakatnya.

Sementara itu mengenai tingkat pemahaman masyarakat dalam persoalan pemeliharaan lingkungan hutan seperti menyangkut peran serta dalam berbagai usaha melestarikan hutan cukup menarik untuk dicermati. Peran serta masyarakat tamping terkait usaha melestarikan lingkungan hutan di sekitar mereka, mungkin saja dilakukan dalam rangka melaksanakan program perhutani atau mungkin juga dapat timbul dari kesadaran pribadi. Berbagai tindakan yang merupakan bentuk aktivitas melestarikan lingkungan hutan dapat berupa misalnya: 1) ikut mengawasi kelestarian berbagai potensi hutan seperti pohon-pohon ataupun flora dan fauna lain dari berbagai bentuk pengrusakan dan pencurian, 2) menghindari tindakan atau perilaku yang sekiranya dapat merusak kelestarian hutan, 3) melakukan tindakan atau perilaku aktif dalam rangka melestarikan lingkungan hutan. Terkait dengan pemahaman masyarakat tamping terhadap masalah usaha pemeliharaan lingkungan seperti di atas, dari 250 orang yang diwawancarai, 35 atau 14% responden merupakan orang yang sangat paham dan 91 atau 36,4% responden cukup paham. Sementara itu 88 atau 35,2% responden merupakan kelompok orang yang kurang paham dan 36 atau 14,4% responden adalah tidak paham.

**TABEL 6**  
**PEMAHAMAN PERMASALAHAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP KHUSUSNYA HUTAN**

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat paham	35	14
2	Cukup paham	91	36,4
3	Kurang paham	88	35,2
4	Tidak paham	36	14,4
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 18)

Eksistensi suatu hal atau objek tertentu pasti akan sangat dipengaruhi oleh faktor kontribusi positif lingkungan di sekitar hal atau objek tertentu tersebut berada. Hutan pun juga demikian halnya. Kondisi baik buruknya sebuah lingkungan hutan akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang hidup di sekitar hutan tersebut. Dalam hal ini menyangkut perilaku masyarakat, sikap dan juga kesadaran masyarakat terhadap hutan di sekitar mereka. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dari masyarakat terhadap lestarnya hutan di sekitar mereka merupakan indikator kepedulian masyarakat tersebut terhadap lingkungannya. Dalam penelitian ini juga dilihat bagaimana pemahaman masyarakat tamping terhadap persoalan kepedulian terhadap lingkungan hutan di sekitarnya. Apakah mereka paham jika kelestarian hutan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau Perum Perhutani. Mereka sebagai masyarakat yang kehidupan sehari-harinya selalu bersentuhan langsung dengan hutan, apakah juga merasa memiliki tanggung jawab dalam ikut serta memelihara hutan.

Dari 250 masyarakat tamping yang diwawancarai, 53 atau 21,2% responden adalah kelompok masyarakat yang sangat paham dan 100

atau 40% responden cukup paham. Sementara itu 57 atau 22,8% responden kurang paham dan 40 atau 16 % tidak paham. Ketidakhahaman ini terjadi karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa lingkungan hutan sudah ada yang bertugas untuk memeliharanya. Mereka hanya tinggal sebagai penduduk secara turun temurun. Kebetulan saja tinggalnya berdekatan dengan lingkungan hutan sehingga tiap hari harus melakukan aktivitas di hutan.

Dalam pengelolaan kawasan hutan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari tersebut, masyarakat tamping secara *common sense* memiliki pengetahuan tentang fungsi hutan bagi kehidupan mereka. Dengan memanfaatkan kawasan hutan, mereka juga terlibat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Peran serta masyarakat dalam memelihara hutan memang terjadi dalam setiap aktivitas sehari-hari. Meski demikian masyarakat tamping sebagian besar berkeyakinan bahwa kelestarian lingkungan hutan pada akhirnya juga akan berhubungan dengan kelestarian kehidupan mereka. Tidak berlebihan jika masyarakat tamping menjadikan peran serta pelestarian hutan bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka, melainkan juga sudah menjadi bagian integral dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

**TABEL 7**  
**PEMAHAMAN TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM**  
**MEMELIHARA LINGKUNGAN HUTAN**

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat paham	53	21,2
2	Cukup paham	100	40
3	Kurang paham	57	22,8
4	Tidak paham	40	16
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 20)

Kenyataan tersebut menunjukkan jika sebagian besar masyarakat tamping masih menunjukkan tingkat kesadaran cukup tinggi bahwa mereka seharusnya ikut berperan dalam melestarikan hutan-hutan yang ada disekitar pemukiman mereka. Hanya sebagian kecil kelompok masyarakat saja yang kurang faham bahwa melestarikan lingkungan hutan adalah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka juga.

Menariknya, meski sebagian dari mereka kurang paham tentang kelestarian hutan, tetapi mereka tetap menganggap penting makna hutan sebagai bagian dalam kehidupannya. Hampir setiap hari aktivitas mereka jalankan di hutan, entah berladang, mencari kayu bakar atau bekerja di perhutani. Ketergantungan pada sumberdaya di hutan telah membuat masyarakat pinggiran hutan selalu memanfaatkannya untuk kepentingan pemenuhan hidup sehari-hari. Dari aspek kepentingan ini, maka masyarakat tamping secara alamiah selalu bergerak menguatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

Hutan telah menjadi bagian penting bagi masyarakat tamping. Kesadaran itu membentuk sebuah pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Sekitar 26,8% (67 orang) dari 250



masyarakat tamping menyadari pentingnya hutan dijaga dan dilestarikan. Pelestarian hutan dianggap sebagai bagian penting kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan yang tidak memiliki kesadaran untuk kepentingan ini sekitar 30 orang atau 12%, sisanya berada pada posisi cukup paham. Temuan ini mengindikasikan betapa masyarakat tamping masih potensial sebagai 'penjaga' alami dari kelestarian lingkungan hidup. Meski terkendala bahasa, mereka tetap menganggap bahwa kelestarian lingkungan terkait dengan masa depan kelangsungan kehidupan mereka sendiri.

**Tabel 8**  
**PEMAHAMAN TENTANG PENTINGNYA KESADARAN MASALAH**  
**PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat paham	67	26,8
2	Cukup paham	86	34,4
3	Kurang paham	67	26,8
4	Tidak paham	30	12
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 21)

Tabel di atas menunjukkan fakta bahwa keterkaitan masyarakat tamping terhadap kelestarian lingkungan hidup terjalin secara pragmatis. Pragmatis dalam pengertian adanya sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sehingga mau tidak mau keterlibatan dalam pemeliharaan lingkungan hidup berjalan dalam konteks nilai pragmatis tersebut.

Sebagai masyarakat yang hidupnya tergantung pada hasil-hasil hutan, masyarakat tamping memiliki sejumlah pengetahuan (*common*

*sense*) terkait dengan batas pemanfaatan hutan. Pengalaman kehidupan itu terus menerus terjadi sehingga menjadi semacam tradisi berkaitan dengan bagaimana mengelola kehidupan sehari-hari. Belajar dari pengalaman kehidupan itu, masyarakat tamping juga menjadikannya itu sebagai semacam pengetahuan tentang batas pengelolaan lingkungan hutan. Meskipun ada beberapa batas pengelolaan yang diperolehnya dari persentuhan dengan pihak-pihak pengelola hutan seperti Perhutani, semisal menebang pohon dan membuang sampah sembarangan.

Dari 250 orang responden, sekitar 153 orang (61,2%) memiliki pemahaman yang baik dan cukup baik terkait dengan batas pemanfaatan hutan. Batas pemanfaatan hutan yang tidak hanya bersumber dari pengalaman, tapi larangan yang dipasang pihak Perhutani. Hanya sekitar 57 orang atau 22,8% yang kurang memahami batas tersebut, selebihnya 16% (40 orang) tidak paham tentang batas-batas pemanfaatan hutan. Ketidakhahaman ini bukan kemudian mereka melakukan kerusakan lingkungan hutan, melainkan mereka tidak memahami bahwa pemanfaatan hutan harus mengikuti pola sistem yang ada agar di kemudian hari tidak terjadi dampak buruk akibat kesalahan pemanfaatan hutan.

**Tabel 9**  
**PEMAHAMAN TENTANG BATASAN YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH**  
**DILAKUKAN DALAM PEMANFAATAN HUTAN**

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat paham	53	21,2
2	Cukup paham	100	40
3	Kurang paham	57	22,8
4	Tidak paham	40	16
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 22)

Hutan memang menjadi sandaran utama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tamping. Lingkungan yang sedikit terisolir tersebut menjadikan masyarakatnya lebih banyak mengandalkan hasil hutan sebagai tempat beraktivitas sosial maupun ekonomi. Sebagaimana dijelaskan di awal bab ini, mayoritas pendidikan mereka yang rendah menjadikan mereka tidak terserap pada sektor kerja formal, pilihan pekerjaan adalah sebagai petani maupun buruh di perhutani. Tidak heran jika hampir keseluruhan aktivitas hidupnya dihabiskan di dalam hutan, termasuk di dalamnya bekerja. Karena aktivitas-aktivitas tersebut menjadikan masyarakat tamping akhirnya juga bersentuhan dengan berbagai pihak pengelola hutan yang sudah memberikan rambu-rambu bagi masyarakat yang memanfaatkan hutan.

Hidup dan bermukim di sekitar lingkungan hutan membuat masyarakat tamping juga melakukan aktivitas komersil lainnya. Lingkungan hutan memang tidak hanya memberikan penghasilan seperti kayu bakar dan berladang. Banyak aktivitas lainnya yang juga dilakukan oleh masyarakat tamping, seperti mencari rumput untuk kepentingan

hewan ternaknya, mencari daun jati untuk dijual ke pasar, serta mencari burung. Aktivitas-aktivitas itu memang bersinggungan secara langsung dengan lingkungan hutan. Hutan di sekitar mereka cukup banyak memberikan ketersediaan berbagai sumberdaya yang diinginkan oleh masyarakat tamping. Masyarakat tamping memang dikenal sebagai komunitas yang bergantung pada sumberdaya hutan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir separuh hidupnya, berada dan bersentuhan dengan hutan dengan problematikanya. Hal ini dapat diperhatikan dengan data pada gambar di bawah ini serta tabel 10 di bawah aktivitas komersial yang sederhana dilakukan oleh masyarakat tamping.



Gambar 1. Area hutan yang digunakan untuk sawah

Gambar di atas menunjukkan salah satu pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tamping berupa pengolahan lahan hutan menjadi ladang/sawah. Penggunaan lahan tanah ini umumnya telah mendapat ijin dari pihak Perhutani. Pengelolaan hutan untuk kepentingan peladangan/persawahan seringkali memanfaatkan lokasi hutan yang

kawasan ternaknya, mencari pasar untuk dijual ke pasar, serta mencari  
 peluang. Aktivitas-aktivitas itu memang berlangsung secara langsung  
 dengan lingkungan hutan. Hutan di sekitar mereka cukup banyak  
 memberikan ketersediaan berbagai sumberdaya yang diinginkan oleh  
 masyarakat tameng. Masyarakat tameng memang dikenal sebagai  
 komunitas yang bergantung pada sumberdaya hutan dalam kehidupan  
 sehari-hari. Hampir seperti halnya masyarakat adat dan pesenunan dengan  
 hutan dengan problematikanya. Hal ini dapat diperlihatkan dengan data  
 pada gambar di bawah ini serta tabel 10 di bawah aktivitas komersial yang  
 sederhana dilakukan oleh masyarakat tameng



Gambar 1. Area hutan yang digunakan untuk sawah

Gambar di atas menunjukkan salah satu pemanfaatan hutan yang  
 dilakukan oleh masyarakat tameng berupa pengolahan lahan hutan  
 menjadi ladang sawah. Penggunaan lahan hutan ini umumnya telah  
 mendapat ijin dari pihak Pemerintah. Pengelolaan hutan untuk kepentingan  
 bidang pertanian sawah seringkali memanfaatkan lokasi hutan yang

dekat dengan perkampungan penduduk. Hal ini dilakukan agar pengawasan terhadap hasil-hasil tanaman dapat dilakukan secara maksimal. Meskipun demikian, seringkali terdapat resiko pembukaan lahan baru untuk kepentingan alih fungsi hutan menjadi area persawahan. Namun demikian, pihak pengelola hutan juga tidak sembarangan dalam memberikan ijin pembukaan lahan baru untuk kepentingan alih fungsi hutan menjadi persawahan. Sementara untuk table 10 dapat menjelaskan aktivitas tersebut.

**Tabel 10**  
**AKTIVITAS KOMERSIAL YANG SELAMA INI**  
**BERSINGGUNGAN DENGAN HUTAN**

NO	AKTIVITAS	JUMLAH	%
1	Menggembala	46	18,4
2	Mencari rumput	43	17,2
3	Menggarap lahan kosong	33	13,2
4	Mencari reneck dan kayu bakar	45	18
5	Mencari daun jati	21	8,4
6	Berburu burung & binatang lain	15	6
7	Tidak pernah bersinggungan	47	18,8
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 23)

Pemanfaatan hutan untuk area persawahan dan pemukiman pada dasarnya selalu berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat tamping. Penjagaan atas kedua area tersebut menjadi tanggung jawab penuh warga, sementara di luar area itu dianggap sudah ada pengelola yang bertugas mengurusinya. Tidak heran jika area sawah dan pemukiman adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan

mereka setiap hari. Sedangkan wilayah hutan yang lain, tidak begitu mendapat perhatian dari mereka.



Gambar 2. Area hutan yang digunakan untuk pemukiman

Memperhatikan rumah di atas, terlihat bahwa jarak antar rumah yang satu dengan lainnya relatif agak jauh. Kondisi ini tentu saja juga membuat antar mereka jarang melakukan komunikasi, kecuali untuk saat-saat pertemuan warga maupun ketika bertemu di sekitar tempat bekerja. Proses interaksi yang jarang dilakukan ini, selain meminimalisir mereka membicarakan persoalan-persoalan publik yang menjadi perbincangan di luar mereka, juga membuat mereka tidak mempedulikan berbagai isu di luar mereka, apalagi yang dianggap tidak berhubungan secara langsung kondisi keseharian warga masyarakat tamping.

PM Laksono dkk (2000: 89) mengatakan bahwa komunitas lokal sekitar hutan cenderung lebih menikmati beraktivitas komersial dan memanfaatkan kawasan hutan. Bagi mereka memenuhi kebutuhan hidup

mereka setiap hari. Sedangkan wilayah hutan yang lain, tidak begitu mendapat perhatian dari mereka



Gambar 2. Area hutan yang digunakan untuk pemukiman

Memperhatikan tumbuh di atas, terlihat bahwa jarak antar rumah yang satu dengan lainnya relatif agak jauh. Kondisi ini tentu saja juga membuat antar mereka jarang melakukan komunikasi, kecuali untuk saat-saat pertemuan warga maupun ketika berhemah di sekitar tempat bekerja. Proses interaksi yang jarang dilakukan ini, selain meminimalisir mereka menicarakan persoalan-persoalan publik yang menjadi pertimbangan di luar mereka, juga membuat mereka tidak membedakan perbedaan isu di luar mereka, sebagai yang dianggap tidak berhubungan secara langsung kondisi kehidupan warga masyarakat tampong

PM Laksono dkk (2000: 89) mengatakan bahwa komunitas lokal sekitar hutan cenderung lebih menikmati aktivitas komersial dan memanfaatkan kawasan hutan. Bagi mereka memenuhi kebutuhan hidup



dengan memanfaatkan hasil-hasil hutan adalah pola hubungan pragmatis yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar. Biasanya mereka justru memiliki *local wisdom* terkait dengan penjagaan kelestarian hutan. Aktivitas komersial yang dilakukan pun tidak bersifat eksploitatif, tapi sekedarnya saja sesuai dengan batas kebutuhan hidup mereka. Kerusakan lingkungan hutan yang selama ini terjadi justru dilakukan oleh orang-orang luar desa mereka karena kekuatan modal.

Dalam rangka menciptakan model masyarakat pinggiran hutan yang dapat menyelenggarakan kemandirian dalam memanfaatkan hutan tanpa harus bersikap eksploitatif memang perlu dilakukan. Karena selama ini justru masyarakat hutanlah yang memiliki kepedulian memanfaatkan menjaga kelestarian hutan sekaligus menikmati hasil-hasil hutan. Dalam konteks ini masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaanya dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya. Kedua, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.

Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

hidup. Ketiga, menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Meningkatnya ketanggapsegeraan masyarakat akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif. Keempat, memberikan saran dan pendapat. Kelima, menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Dengan meningkatnya ketanggapsegeraan akan meningkatkan kecepatan pemberian informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Berikut ini berbagai aktivitas masyarakat tamping yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan hutan. Sekitar 21,2% (53 orang) terlibat dalam penanaman kembali pohon, 46 orang (18,4) membantu proses penjarangan, 13,6% atau 34 orang membantu pemeliharaan hutan dan 8% bertugas mengawasi atau mencegah terjadinya pencurian kayu, sisanya tidak melakukan apa-apa. Aktivitas-aktivitas tersebut memang belum optimal, karena belum menguatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan. Padahal melibatkan masyarakat tamping dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan lebih efektif dan efisien karena berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Selama ini masyarakat tamping memang lebih banyak bersikap pasif dalam pengelolaan kelestarian hutan. Pasif dalam konteks menunggu pihak pengelola hutan memberikan ruang bagi aktivitas kerja mereka. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak

memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan kelestarian lingkungan hutan. Hanya saja mereka masih mendapati sejumlah kendala berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang akhirnya berkaitan dengan isu *global warming*, meski ternyata masyarakat tamping belum merespon isu tersebut dalam pemanfaatan lingkungan huta.

**Tabel 11**  
**AKTIVITAS YANG BERPERAN**  
**DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN**

NO	AKTIVITAS	JUMLAH	%
1	Membantu perhutani menanam pohon	53	21,2
2	Membantu proses penjarangan	46	18,4
3	Membantu pemeliharaan tanaman hutan	34	13,6
4	Ikut mengawasi/mencegah pencurian kayu	20	8
5	Tidak pernah terlibat	97	38,8
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 24)

Kegiatan masyarakat tamping memang tidak hanya berpotensi dalam penjagaan lingkungan hutan secara memadai, tetapi secara tidak disadari mereka juga melakukan aktivitas yang berpotensi merusak kelestarian hutan. Tabel 12 menunjukkan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu stabilitas lingkungan hutan, yakni menggembala sekitar 18,3 % (46 orang), menebang pohon 9,2 % (23 orang), mencari recek dan kayu bakar serta daun jati sekitar 26,4, dan berburu burung dan hewan lainnya sekitar 6% atau 15 orang. Aktivitas tersebut memang tidak menjadi kegiatan yang dapat merusak lingkungan secara permanen, karena hanya bersifat lokal dan tidak massal. Mereka melakukannya hanya untuk memenuhi tuntutan hidup, bukan bersifat eksploitatif seperti

kasus-kasus perusakan hutan yang sifat massal dan modern demi kepentingan industrialisasi.

Tabel 12  
AKTIVITAS YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN HUTAN

NO	AKTIVITAS	JUMLAH	%
1	Menggembala	46	18,4
2	Menebang pohon	23	9,2
3	Mencari reneck dan kayu bakar	45	18
4	Mencari daun jati	21	8,4
5	Berburu burung & binatang lain	15	6
6	Tidak ada	100	40
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 25)

Dari table 12 di atas memang dapat diperhatikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak tersebut sesungguhnya menjadi aktivitas rutin masyarakat tamping. Aktivitas yang bersentuhan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Tanpa keterlibatan pihak luar, seperti industry perkayuan dan sebagainya, pola pikir masyarakat tamping tidak akan *economic oriented* dalam memanfaatkan lingkungan hutan.

Terkait dengan pemahaman masyarakat tamping terhadap isu *global warming* terlihat betapa isu ini tidak menjadi isu utama. Alih-alih menjadi isu utama, isu *global warming* tidak pernah menjadi perbincangan masyarakat tamping. Sebenarnya bisa dimaklumi. Realitas pemahaman masyarakat tamping terhadap isu *global warming* maupun pelestarian lingkungan yang sedemikian memprihatinkan tidak saja karena pengaruh tingkat pendidikan, melainkan juga akses informasi yang rendah terhadap isu lingkungan.

Yang menarik, isu pelestarian lingkungan bagi mereka memang tidak menjadi perbincangan sehari-hari. Tapi secara kognitif, masyarakat tamping memiliki *common sense* tentang pentingnya menjaga alam lingkungan di sekitar mereka agar selalu dirawat dan dijauhkan dari perilaku berlebihan. Bagi mereka, lingkungan hutan telah memberikan hasil-hasilnya bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sehingga merawatnya merupakan bagian dari upaya menyelamatkan akses masa depan kehidupan masyarakat di pinggiran hutan.

Secara tidak langsung, masyarakat tamping memang memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan pelestarian lingkungan, apalagi *global warming*. Namun demikian, pemahaman pelestarian lingkungan yang mereka miliki lebih pada sebatas bagaimana menyelamatkan akses-akses ekonomi berupa lahan pertanian yang mereka tanami beserta lingkungan sekitarnya. Justru dengan *common sense* ini, masyarakat tamping tetap berusaha menjaga kelestarian lingkungan secara alami.

Konstruksi pemahaman pelestarian hutan seperti ini memang masih terlampau sederhana, dan sangat mudah berubah atau digeser oleh kepentingan ekonomi. Artinya, aktivitas ekonomi yang didominasi mendapatkan keuntungan ekonomi dari pengelolaan hutan akan berpotensi untuk mengubah cara pandang masyarakat tamping terhadap pelestarian lingkungan hutan. Sebagaimana diketahui, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi memudahkan orientasi masyarakat tamping dalam pengelolaan lingkungan hutan.

Pemahaman tentang pelestarian hutan dan isu *global warming* masyarakat tamping sangat dipengaruhi oleh warisan pengetahuan yang selama ini mereka dapatkan atau tradisi yang tumbuh dan berkembang serta diperoleh dari petugas pengelola hutan (pihak perhutani) yang berkepentingan terhadap kelestarian hutan tersebut, utamanya pohon-pohonnya. Rasa memiliki hutan baru berupa rasa memiliki area yang dikelolanya bagi kepentingan ekonomi mereka. Pengetahuan yang terbatas ini tentu saja terkait dengan kondisi pendidikan, tingkat ekonomi, keterbatasan akses informasi serta komitmen perhutani terhadap hubungan mutualis dengan masyarakat setempat.

### **5.3. Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Persoalan Pelestarian Lingkungan dan *Global Warming***

Issue seputar lingkungan hidup, khususnya masalah pemanasan global atau *global warming* dalam banyak hal memang masih belum tersosialisasikan kepada masyarakat tamping. Memprihatinkan memang. Ketika di belahan masyarakat lain, isu *global warming* begitu cepat mendapatkan respon global, bahkan banyak warga yang kemudian berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam meminimalisir dampak buruk pemanasan global, tapi masyarakat tamping pinggiran hutan di Bojonegoro dan Tuban ternyata masih menemui sejumlah kendala dalam pemerolehan arus informasi tersebut. Padahal sebagai masyarakat pinggiran hutan, problema *global warming* hendaknya menjadi satu isu

penting terkait dengan situasi rusaknya lingkungan dunia. Hutan dianggap sebagai penyangga bumi agar tidak cepat rusak alam lingkungannya.

.Berbagai kendala biasanya selain karena wilayah yang agak terisolir, juga karena akses mencapai tempat tersebut cukup melelahkan dan sulit terjangkau. Implikasi logisnya, mengakibatkan masyarakat tamping mengalami kesulitan mendapat berbagai akses pemerolehan dan merespon informasi, termasuk isu tentang *global warming*. Kendala utama dari rendahnya merespon isu *global warming* adalah terkait dengan bahasa.

Disadari bahwa bahasa yang banyak digunakan dalam informasi tentang isu lingkungan hidup, terutama *global warming* selain menggunakan Bahasa Inggris, juga dilakukan dengan Bahasa Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena Bahasa Inggris merupakan bahasa pergaulan internasional, sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara. Arus informasi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup pada akhirnya akan dominan menggunakan kedua bahasa tersebut. Realitas ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan kedua bahasa tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Masyarakat tamping di sekitar hutan Bojonegoro dan Tuban mengalami kendala ini.

Data yang diperoleh menunjukkan fakta bahwa ternyata dari 250 responden ternyata 100%dari mereka lebih banyak menggunakan bahasa jawa (ngoko/kromo), bahkan tidak pernah menggunakan bahasa selain

bahasa ini. Penggunaan Bahasa Jawa ini memang berlatasan, selain karena memang merupakan bahasa ibu, Bahasa Jawa hanya menjadi satu-satunya bahasa yang paling akrab mereka gunakan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional hanya digunakan dalam forum-forum resmi seperti di pendidikan formal saja, sementara kantor formal seperti balai desa juga lebih banyak menggunakan bahasa Jawa dalam komunikasi antara birokrasi desa.

Tabel 13  
BAHASA KOMUNIKASI

NO	BAHASA	JUMLAH	%
1	Bahasa Jawa (Ngoko/Kromo)	250	100
2	Bahasa Indonesia	-	
3	Bahasa campuran Jawa dan Indonesia	-	
4	Lainnya	-	
	JUMLAH	250	100

Tabel 13 di atas menunjukkan fakta terkait dengan bahasa komunikasi yang selalu dilakukn oleh masyarakat tamping. Masyarakat tamping memang tidak akan banyak, bahkan tidak sama sekali menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan komunikasi. Bahkan terhadap orang luar pun mereka tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasinya. Kosa kata bahasa ibu mereka (bahasa jawa) tidak memiliki frase berkaitan dengan isu *global warming*, kecuali istilah menjaga lingkungan. Menurut Eric Fromm (1968) pikiran atau kognisi manusia biasanya dibentuk oleh percakapan dan pengalaman kehidupan mereka. Dalam komunikasi yang menggunakan *monolingual* akan membentuk pola pengetahuan sama terkait dengan area perbincangan



sebagai *common sense* seseorang tentang segala sesuatu terkait dengan area perbincangan itu.

Minimnya proses komunikasi dengan menggunakan bahasa selain bahasa ibu mereka, menyebabkan isi pewacanaan tidak terkait dengan beragam peristiwa di luar diri mereka. Pengalaman kehidupan mereka sehari-hari terkait dengan sawah, tanah, ternak dan ruang lingkungannya membuat mereka miskin pengetahuan di luar pengalaman kehidupan mereka. Pada tabel 14 juga ditemukan data tentang penguasaan mereka terhadap bahasa Indonesia.

Tabel 14  
PEMAHAMAN TERHADAP BAHASA INDONESIA

NO	PEMAHAMAN	JUMLAH	%
1	Sangat kurang	130	52
2	Kurang	79	31,6
3	Pas-pasan	41	16,4
4	Cukup	-	
	JUMLAH	250	100

(Sumber: Data Primer hasil tabulasi kuessioner nomor 25)

Terlihat betapa penguasaan bahasa Indonesia yang cenderung rendah tentu saja menyulitkan mereka mendapat pengetahuan yang benar dan konstruktif tentang isu pelestarian lingkungan dan *global warming* yang hampir didominasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Data di atas menunjukkan betapa masih memprihatinkannya pemahaman masyarakat tamping terhadap bahasa Indonesia. Bayangkan dari 250 orang, sekitar 130 orang (52%) sangat kurang memahami bahasa Indonesia, yang kurang dan pas-pasan sebanyak 120 orang

(68%). Kondisi ini tentu saja berkaitan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat tamping yang mayoritas hanya berpendidikan SMP.

Realitas penggunaan dan pemahaman bahasa komunikasi ini tentu saja kian menyulitkan masyarakat tamping untuk mendapatkan informasi seputar isu lingkungan hidup secara memadai. Alih-alih dapat memberikan respon, mendapatkan informasi yang benar dan tepat pun mereka mengalami kesulitan. Menjadi wajar jika masyarakat tamping bersikap tidak tahu menahu terhadap isu lingkungan hidup atau *global warming*. Belum lagi dengan realitas kompetensi penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat tamping juga ditemukan fakta memprihatinkan. Data pada tabel 15 menunjukkan realitas tersebut. Disamping banyak yang tidak berkompeten sekitar 130 orang atau 52%, selebihnya sebanyak 48% atau 120 orang ternyata hanya sebatas pendengar pasif. Untuk terlibat aktif dalam berkomunikasi saja mereka mengalami kendala penguasaan Bahasa Indonesia.

**Tabel 15**  
**KONDISI KOMPETENSI TERHADAP PENGGUNAAN**  
**BAHASA INDONESIA**

NO	KONDISI KOMPETENSI	JUMLAH	%
1	Memiliki kompetensi aktif	-	
2	Hanya sebatas pendengar pasif	120	48
3	Tidak memiliki kompetensi	130	52
	JUMLAH	250	100

Hal ini memang kontradiktif dengan situasi ketersediaan sarana informasi elektronik cukup banyak tersedia. Dari sekitar 250 orang, hanya sekitar 43 orang atau 17,2 % yang tidak memiliki sarana informasi seperti

TV maupun radio. Selebihnya sekitar 82,8% warga memiliki kedua atau salah satu dari sarana informasi tersebut. Padahal diketahui bahwa arus informasi berkaitan dengan isu lingkungan hidup banyak dilakukan melalui media TV maupun radio, sementara kedua media tersebut lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa. Tentu saja memprihatikan. Bagaimana mungkin kepemilikan media elektronik yang dominan dengan bahasa Indonesia justru tidak mengakrabkan masyarakat tamping dengan penguasaan bahasa Indonesia.

**Tabel 16**  
**SARANA INFORMASI ELEKTRONIK SEJENIS**  
**RADIO/TELEVISI YANG DIMILIKI**

NO	SARANA INFORMASI	JUMLAH	%
1	TV & radio	82	32,8
2	TV saja	71	28,4
3	Radio saja	54	21,6
4	Tidak punya	43	17,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Tabel 17 semakin menguatkan fakta betapa minimnya penggunaan sumber informasi masyarakat tamping dalam memperoleh informasi. Tidak ada satupun warga tamping yang memiliki atau berlangganan media massa. Memang alasan ekonomi menjadi alasan utama dalam menyediakan media informasi. Kepemilikan media elektronik pun hanya sebatas digunakan sebagai sarana hiburan, bukan dijadikan sebagai sarana mendapatkan berita atau informasi penting. Minimalisnya informasi terkait dengan pelestarian lingkungan dan isu global warming berimpikasi logis terhadap penguasaan atas isu tersebut di kalangan warga masyarakat tamping.

**Tabel 17**  
**SARANA INFORMASI NONELEKTRONIK**  
**KORAN/MAJALAH YANG DIMILIKI**

NO	SARANA INFORMASI	JUMLAH	%
1	Tidak berlangganan koran/majalah	250	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Kendala pemerolehan informasi tentang isu lingkungan hidup memang bersumber dari sulitnya mereka memahami bahasa yang disampaikan lewat media tersebut. Padahal bahasa selalu menjadi alat penting dalam sosialisasi termasuk di dalamnya adalah dominasi. Sedangkan media massa berfungsi sebagai *transmission of culture* yang efektif bagi sebuah sosialisai budaya tertentu. Jadi, penggunaan media massa dan bahasa sebagai alat sosialisasi sekaligus transformasi paling memungkinkan bagi masyarakat dalam memperoleg informasi sekaligus mengubah perilaku masyarakat.

Dengan demikian, minimnya penggunaan media elektronik dan media massa menjadi kendala dalam penguasaan informasi apapun, apalagi kendala tersebut kian diperparah dengan minimnya penguasaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat tamping. Rendahnya penguasaan bahasa Indonesia ini membuat masyarakat tamping jarang mendengarkan berita, apalagi membaca berita. Aktivitas yang paling banyak di lakukan adalah menjadi pendengar pasif, atau mencari chanel TV yang tidak berkaitan dengan sumber berita, melainkan hanya hiburan semata yang dicari. Padahal berita dan informasi berkaitan dengan lingkungan hidup dan *global warming* termasuk jarang muncul di media.

Hal ini tentu saja semakin menyulitkan akses memperoleh informasi masyarakat tamping.

**Tabel 18**  
**SARANA INFORMASI ELEKTRONIK/ NON ELEKTRONIK YANG DAPAT**  
**MENJANGKAU INFORMAN DALAM MEMPEROLEH INFORMASI**  
**(WALAU BUKAN MILIK SENDIRI)**

NO	SARANA INFORMASI	JUMLAH	%
1	TV, radio, Koran, majalah	43	17,2
2	TV, radio, Koran	40	16
3	TV dan radio	94	37,6
4	TV saja	33	13,2
5	Radio saja	19	7,6
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bagaimana persepsi masyarakat tamping terhadap isu *global warming*. Selain tidak memiliki gambaran apapun berkaitan dengan isu tersebut, bahkan mengenai istilahnya saja mereka kesulitan dan terlampau asing. Mereka yang terlanjur akrab dengan bahasa Jawa, sekaligus akrab dengan istilah lingkungan dan 'alas' memang mengalami kendala bahasa ketika mendapatkan informasi berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Bahkan ketika informasi tersebut disampaikan dengan verbal, masyarakat tamping juga mengalami kendala yang cukup kuat untuk bisa mengerti dan memahaminya. Dari hasil observasi ditemukan fakta bahwa hampir semua responden tidak mengenal istilah pemanasan global. Sebuah istilah yang dianggap terlalu jauh dari kultur mereka, jadi cenderung diabaikan dan tidak mau terlibat untuk membahasnya.

**Tabel 19**  
**DESKRIPSI PENGENALAN ISTILAH PEMANASAN GLOBAL**

NO	Pengenalan	JUMLAH	%
1	Tidak tahu	250	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Istilah pemanasan global atau *global warming* memang menjadi sebuah istilah asing bagi masyarakat tamping. Aktivitas kehidupan sehari-hari selalu bergumul dengan hutan menjadikannya tidak begitu peduli terhadap problema di luar lingkungan mereka, apalagi jika hal itu terkait dengan isu global. Meskipun mereka menyadari bahwa fungsi hutan bagi masyarakat begitu penting, tapi mereka tidak pernah berpikiran sejauh dari kehidupan yang melingkupinya. Ketiak sejumlah responden diberikan pertanyaan tentang informasi apa saja yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang mereka dapat dari media. Hanya sekitar 62 orang atau 24,8% menyatakan mendapatkan berita tentang iklan lingkungan dan bencana alam akibat kerusakan lingkungan, sedangkan 188 orang atau sekitar 75,2% menyatakan tidak tahu apa-apa terkait dengan berita kerusakan lingkungan tersebut (lihat tabel 20).

**Tabel 20**  
**PERAN MEDIA DALAM PEMBERIAN INFORMASI**  
**PELESTARIAN HUTAN**

NO	Deskripsi	JUMLAH	%
1	Iklan lingkungan di TV	17	6,8
2	Berita bencana alam akibat kerusakan hutan	45	18
3	Tidak tahu	188	75,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Dengan demikian, sangat jelas terlihat betapa masyarakat tamping sesungguhnya tidak merespon berbagai berita terkait dengan isu lingkungan hidup ini. Padahal menurut Hans Daeng (2000: 134) kepedulian masyarakat terhadap lingkungan salah satunya ditandai dengan bagaimana mereka melakukan respon atas berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi, baik disekitar mereka maupun di luar lingkungan mereka. Ketidapedulian masyarakat tamping bukan karena mereka sengaja tidak peduli, melainkan karena minimnya informasi verbal yang mereka dapatkan. Kalau toh mereka mendapatkannya, itupun susah untuk dimengerti terkait dengan kendala bahasa yang ada. Menjadi wajar jika dalam tabel 21 ditemukan juga bukti betapa mayoritas responden, sekitar 184 orang atau 73,6 % tidak mengetahui media apa yang memiliki peran memberikan informasi pelestarian hutan.

**Tabel 21**  
**MEDIA YANG PALING BERPERAN MENGENAI INFORMASI**  
**PELESTARIAN HUTAN**

NO	MEDIA	JUMLAH	%
1	TV	21	8,4
2	Radio	45	18
3	Tidak tahu	184	73,6
	JUMLAH	250	100

Namun demikian, ditengah kecemasan publik atas minimnya respon masyarakat tamping terhadap isu pelestarian hutan, ada secercah harapan bahwa ternyata mereka percaya bahwa sejumlah media dapat digunakan sebagai sarana memperoleh informasi pelestarian lingkungan. Bagi masyarakat tamping, media TV dianggap memiliki peran paling

efektif dan mudah dalam pemberian pemahaman ini yakni sekitar 125 orang atau sekitar 50%, sisanya menganggap radio dan media lainnya. Mengapa televisi? Karena masyarakat tamping lebih menyukai berlama-lama di depan televisi dengan melihat dan mendengar daripada hanya sekedar membaca apalagi mendengarnya.

Bagi masyarakat tamping media televisi yang menampilkan gambar dan ada percakapannya membuat mereka lebih mudah memahami pesan yang disampaikan, meskipun berupa visualisasi gambar atau iklan. Melalui media televisi berbagai informasi dapat mereka saksikan, meskipun masih sangat susah untuk mengerti secara penuh informasi yang tersampaikan.

**Tabel 22**  
**MEDIA YANG DIANGGAP EFEKTIF DAN MUDAH DALAM PEMBERIAN PEMAHAMAN UNTUK INFORMASI PELESTARIAN HUTAN**

NO	MEDIA	JUMLAH	%
1	TV dan Radio	78	31,2
2	TV	125	50
3	Radio	47	18,8
	JUMLAH	250	100

Memperhatikan perilaku menonton masyarakat tamping yang lebih dominan daripada mendengar radio atau dikumpulkan di sebuah tempat untuk mendengarkan penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan, maka tidak heran jika televisi dianggap sebagai media paling efektif dan mudah diterima. Persoalannya, berbagai kendala terkait dengan pemerolehan informasi melalui media ternyata masih cukup kuat.



**Tabel 23**  
**KENDALA PEMEROLEHAN INFORMASI LEWAT MEDIA**  
**(ELEKTRONIK/CETAK)**

NO	KENDALA	JUMLAH	%
1	Kurang mengerti bahasanya	121	48,4
2	Kurang tertarik	31	12,4
3	Jarang melihat/mendengarkan/membaca	16	6,4
4	Tidak ada waktu	33	13,2
5	Tidak memiliki medianya	43	17,2
6	Tidak ada informasi di media yang dimiliki	3	1,2
7	Hanya melihat acara hiburan	3	1,2
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Tabel 23 di atas memberikan data tentang berbagai kendala yang ada. Di samping kesulitan mengerti bahasa sekitar 48,4 %, masyarakat tamping ternyata tidak tertarik dan tidak ada waktu untuk sekedar mendengarkan informasi yang secara langsung tidak berhubungan dengan keadaan mereka. Isu pemanasan global dianggapnya bukan perbincangan dan bukan sesuatu yang dibutuhkan. Masyarakat tamping lebih suka berada di persawahan atau ladang hutan daripada harus mendengarkan berita tentang pemanasan global.

Minimnya akses memperoleh informasi ini tentu saja menyulitkan sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan bagi masyarakat tamping. Sebagaimana diketahui, masyarakat tamping juga jarang melakukan interaksi dengan warga masyarakat lainnya, sehingga kurang mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan berbagai isu public, termasuk pelestarian lingkungan dan isu *global warming*. Kendala-kendala terkait dengan pemahaman tentang pelestarian lingkungan dan isu *global*

*warming* memang lebih banyak terdapat dari aspek internal masyarakat tamping itu sendiri.

Berbagai kendala internal berupa; 1) kurangnya penguasaan bahasa Indonesia, 2) tingkat pendidikan yang rendah, 3) minimnya akses memperoleh informasi dari media, dan 4) rendahnya volume interaksi dengan warga lain yang mungkin dapat sedikit membuka pewacanaan tentang isu lain di luar kegiatan mereka sehari-hari. Hal ini dimaklumi karena lingkungan mereka jauh dari masyarakat di luar mereka.,

Kendala penggunaan bahasa yang didominasi bahasa *monolingual* menjadikan transfer *knowledge* yang ada hanya berkuat dari pengalaman kehidupan warga masyarakat tamping serta sedikit informasi dari warga di luar mereka. Kegagalan memaknai hadirnya media elektronika untuk menguatkan arus informasi terkait dengan wacana pelestarian lingkungan dan *global warming*. Alih-alih terkuatkan, yang terjadi justru media elektronika hanya berfungsi sebagai media hiburan dan bukan lagi sebagai sarana mendapatkan pengetahuan baru.

#### **5.4. Potensi dan peran Serta lembaga-lembaga sosial lokal**

Pada sisi peran serta lembaga local, yang paling menonjol adalah peran dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Sebuah lembaga local yang berdiri atas prakarsa warga yang difasilitasi oleh desa setempat. Pada sisi peran Negara hingga saat ini masih terdapat banyak kelemahan terutama berkaitan dengan pengorganisasian dan manajemen

pengelolaan LMDH tersebut. Selain karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), juga rendahnya proses *up-grading* dari SDM itu sendiri. Alasan yang sangat stereotip adalah besarnya biaya pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pengorganisasian warga masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Padahal yang paling menonjol adalah rendahnya komitmen Negara atau pemerintah local dalam memperkuat lembaga local tersebut sebagai garda terdepan bagi *community development* yang menggerakkan warga untuk terlibat dalam berbagai program Negara terkait dengan pelestarian lingkungan serta isu *global warming*.

Terkait dengan peran lembaga sosial dalam pelestarian lingkungan ini memang belum bisa optimal. Meskipun disadari bahwa temuan di lapangan menunjukkan betapa LMDH memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya arti keletarian lingkungan bagi kelangsungan kehidupan mereka, serta bagaimana warga memperoleh informasi yang baik berkaitan dengan isu *global warming* tersebut.

Menurut PM Laksono dkk (2000: 89) dalam komunitas-komunitas sekitar hutan, peran lembaga sosial memiliki makna yang strategis. Artinya, masyarakat setempat membutuhkan lembaga sosial yang terlibat dalam penguatan kapasitas masyarakat, termasuk dalam rangka memobilisasi massa agar terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Masyarakat setempat belumlah memiliki kekuatan memadai untuk

melakukan transformasi sosial berkaitan dengan pengelolaan alam lingkungan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Kondisi masyarakat tamping yang menjadi objek penelitian ini memang mengharuskan adanya keterlibatan lembaga sosial dalam mengintervensi pentingnya pelestarian lingkungan hutan. Pengetahuan yang ada dari mereka yang di dapatkan dari pengalaman kehidupan sehari-hari (*common sense*) belumlah memadai. Kesederhanaan pengetahuan ini jika tidak segera diantisipasi dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kekuatan luar lingkungan mereka yang sudah berorientasi ekonomi dalam rangka mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan hutan. Hans Daeng (2000: 124) mengatakan bahwa keterlibatan lembaga sosial yang *concern* dalam pengelolaan lingkungan hutan selama ini memang telah banyak dilakukan. Namun demikian, ada banyak problema yang muncul dalam keterlibatan lembaga sosial ini, yakni masuknya kepentingan-kepentingan asing yang berupaya menguasai sumberdaya hutan untuk dimanfaatkan secara maksimal, meski cenderung merugikan bagi kelestarian lingkungan hutan.

Dalam konteks ini, maka masyarakat tamping disekitar hutan Bojonegoro dan Tuban selain mendapat informasi pelestarian lingkungan hutan dari media elektronik, mereka juga mendapatkannya dari berbagai lembaga yang ada, baik penyuluhan perhutani yang memang berkepentingan terhadap terjaganya sumberdaya hutan yang menjadi milik mereka, juga dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan(LMDH).

Sebanyak 75 orang (30%) mendapatkannya dari bahwa penyuluhan perhutani, 30,8 % (77 orang) mendapatkannya dari LMDH dan sisanya ternyata mengatakan tidak mendapatkan sumber informasi dari manapun.

Fakta minimnya lembaga sosial yang terlibat dalam sosialisasi pentingnya pelestarian hutan tampaknya juga menjadi kendala bagi masyarakat tamping dalam memperoleh informasi ini. Banyak factor yang menjadi penyebab keterlibatan lembaga sosial begitu rendah, 1) tidak ada isu atau peristiwa kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan di daerah ini, sehingga lembaga sosial yang *concern* dengan isu lingkungan tidak tertarik memberikan pemberdayaan, 2) ketertutupan akses bagi lembaga sosial di luar perhutani atau LMDH untuk masuk dalam ruang-ruang pengelolaan hutan, dan 3) bisa jadi karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tamping yang tidak begitu mempedulikan berbagai problema pengelolaan lingkungan di sekitar mereka. Bagi mereka yang penting bisa memanfaatkan lingkungan hutan bagi kelangsungan hidup mereka itu saja sudah cukup, daripada harus disibukkan dengan berbagai aktivitas yang tidak menghasilkan apa-apa bagi mereka secara langsung.

**Tabel 24**  
**SARANA LAIN SEBAGAI SUMBER INFORMASI**  
**PELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN**

NO	SARANA LAIN	JUMLAH	%
1	Penyuluhan Perhutani	75	30
2	Informasi dari LMDH	77	30,8
3	Tidak ada	98	39,2
	JUMLAH	250	100

Di lain pihak, masyarakat tamping ternyata justru memiliki institusi-institusi non formal yang dianggap lebih efektif dalam mensosialisasikan informasi berdasarkan tingkat kebutuhan dan bahasa yang akrab dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lembaga-lembaga non formal itu sudah melembaga dalam masyarakat tamping seperti majlis tahlilan, hajatan warga maupun pengajian. Kegiatan-kegiatan dalam lembaga-lembaga non formal tersebut rutin diselenggarakan. Biasanya masyarakat tamping terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga non formal ini.

Lembaga non formal biasanya lebih bersifat seremonial daripada sebuah institusi yang sistematis, sebagaimana lembaga formal. Lembaga-lembaga formal muncul sebagai kebutuhan warga masyarakat dalam menjalin komunikasi antar warga serta mudah memobilisasi warga dalam sebuah kegiatan yang sama. Selama ini dalam masyarakat pinggiran hutan yang mayoritas beragama Islam, lembaga non formal yang ada biasanya lebih merupakan perkumpulan warga dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Temuan dalam penelitian yang terangkum dalam tabel 25 di bawah ini menunjukkan bukti bahwa masyarakat tamping beranggapan bahwa sumber informasi menjadi lebih efektif jika disampaikan lewat forum informal seperti tahlilan, pengajian, waktu hajatan warga, kegiatan lain di desa. Sekitar 38% atau 95 orang menganggap bahwa forum ini lebih efektif, karena disamping sudah akrab dengan pikiran masyarakat

setempat juga bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pengetahuan sehari-hari.

**Tabel 25**  
**SUMBER INFORMASI YANG PALING EFEKTIF, MUDAH DIPAHAMI, DAN SESUAI DENGAN KONDISI PENGETAHUAN DAN KEBAHASAAN INFORMAL**

NO	SUMBER INFORMASI	JUMLAH	%
1	Penyuluhan-penyuluhan	84	33,6
2	Pemberitahuan lewat forum informal (tahlilan, pengajian, waktu hajatan warga, kegiatan lain di desa)	95	38
3	Pemberitahuan/teguran langsung di lapangan	34	13,6
4	TV	17	6,8
5	Radio	20	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>250</b>	<b>100</b>

Bagi masyarakat tamping, sumber informasi berkaitan dengan kelestarian lingkungan justru lebih tepat jika menggunakan sarana sosialisasi berupa media atau forum yang setiap hari terlibat dalam kehidupan mereka. Bahasa yang digunakan dipastikan akan sesuai dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Hal ini tentu saja meminimalisir kemungkinan tidak pahamnya masyarakat terkait dengan kendala bahasa yang dimilikinya. Begitu juga dengan kondisi pengetahuan yang dimilikinya. Melalui penggunaan forum-forum non formal justru masyarakat tamping lebih merasa nyaman untuk ikut dalam sosialisasi yang disesuaikan dengan kondisi pengetahuan yang dimilikinya. Selama ini selalu terjadi kesenjangan arus informasi terkait dengan pemanasan global, karena faktor bahasa dan perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki.

Harus diakui bahwa banyak kegagalan dalam sebaran informasi tentang berbagai kebijakan atau isu terkait dengan lingkungan hutan banyak dipengaruhi oleh kegagalan memilih sarana sosialisasi. Karena tidak pernah memperhatikan kebutuhan local serta kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, maka masyarakat pinggiran hutan merasa bahwa sosialisasi tersebut tidak berkaitan dengan kebutuhan mereka, melainkan semacam instruksi dari orang lain yang memiliki kepentingannya sendiri.

Masyarakat hutan atau masyarakat tamping disadari merupakan sekelompok orang yang hidup bergantung pada sumberdaya hutan. Kondisi ini tentu saja akan berhubungan dengan pola pikir, system pengetahuan, lapangan kerja serta ruang lingkup kehidupan di hutan. Oleh karena ini, bagi mereka, kebutuhan sehari-hari adalah bagaimana bisa tetap memanfaatkan sumberdaya hutan demi kelangsungn kehidupan mereka. Letak wilayah yang jauh dari pusat kota juga membawa pengaruh bagi terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat tamping dengan masyarakat luar. Dengan demikian, upaya pemerolehan informasi pelestarian lingkungan harusnya diletakkan dalam konteks bagaimana masyarakat tamping memposisikan dirinya dalam kehidupan di sekitar hutan. Mereka adalah masyarakat yang sejak lahirnya berada di pinggiran hutan dan bergulat dengan berbagai persoalan pengelolaan hutan, sehingga kondisi ini jelas akan membentuk pengalaman kehidupan yang dapat menjadi system pengetahuan local



terkait dengan bagaimana mereka harus mengelola lingkungan hutan bagi kelangsung kehidupan dirinya dan masa depannya.

Menurut Murdiyanto, pendamping LMDH Kedewan sekaligus seorang mandor hutan, selama ini anggota LMDH justru merupakan pilar utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan. Mereka yang aktif memberikan pendampingan dan transformasi pengetahuan kepada warga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Dulu sekitar tahun 80an, ketika LMDH belum berdiri, warga masyarakat banyak yang belum mengetahui batas-batas tentang pengelolaan lingkungan hutan dan pemanfaatannya. Baru setelah ada pengelolaan hutan secara resmi oleh Perhutani dan berdirinya LMDH, warga mulai mengenal adanya *rencok*, sebuah area dalam hutan yang bebas dipergunakan masyarakat meskipun tetap seijin pengelola hutan.

Sementara itu menurut Kasdi (46 tahun), ketua LMDH Kedewan, fungsi lembaga ini selain sebagai wadah warga masyarakat dalam mengelola lingkungan, juga merupakan forum warga yang berkepentingan untuk memberikan kesadaran warga tamping terhadap pentingnya hutan bagi kelangsungan kehidupan masa depan manusia. Menurutnya, memang kelemahan mendasar dari lembaga ini adalah minimnya pengetahuan tentang *global warming* yang membuat mereka enggan menyampaikan informasi perihal isu tersebut kepada warga masyarakat lainnya.

### **5.5. Model Alternatif dalam Pelestarian Lingkungan dan *Global Warming***

Di pihak lain, kondisi lingkungan hidup sudah mencapai tingkat yang memprihatinkan dengan kecenderungan yang terus menurun. Penyebab utamanya adalah, karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan. Hal ini terjadi mengingat kelemahan kekuatan politik dari pihak-pihak yang menyadari pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Seperti diketahui, pada saat ini perjuangan untuk melestarikan lingkungan hanya didukung sekelompok kecil kelas menengah yang kurang mempunyai kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Seperti kelompok – kelompok peduli lingkungan, LSM, individu – individu yang aktif dalam pelestarian lingkungan dan kritis terhadap kebijakan- kebijakan yang merugikan lingkungan, serta kalangan akademisi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektor dan cenderung terpusat, menyebabkan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara optimal.

Yang menarik dalam setiap pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hutan adalah minimnya keterlibatan masyarakat pinggiran hutan. Seolah masyarakat tersebut hanya menjadi objek penderita/penyerta dari berbagai persoalan kelestarian hutan. Bahkan masyarakat tamping -dalam banyak hal- juga seringkali dicurigai sebagai

penyebab terjadinya penurunan kualitas ekologi dalam hutan yang ada, karena perilaku kehidupannya yang tidak tertata. Padahal justru masyarakat tamping adalah masyarakat yang lebih dahulu menerima akibat dari berbagai pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan aturannya. Meskipun harus diakui juga bahwa ternyata ada perilaku dari masyarakat tamping yang cenderung berpotensi merusak kelestarian lingkungan hutan.

Sebagaimana diketahui, di sekitar pinggiran hutan yang menjadi objek penelitian ini terdapat aktivitas penambangan minyak di sumur-sumur tradisional di Desa Wonocolo di satu sisi sedikit dapat meredam aktivitas pencurian kayu jati. Di sisi lain, limbah dari aktivitas tersebut ternyata kurang dikelola dengan baik sehingga merusak tanaman-tanaman hutan di sekitar lokasi penambangan. Penambangan tradisional ini memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat, sehingga pemerintah daerah belum mengambil tindakan preventif berkaitan dengan kondisi rusaknya sebagai lingkungan hutan. Pemerintah mungkin tidak ingin gegabah menutup sumur-sumur tradisional tersebut, karena disamping sudah cukup lama menjadi aktivitas masyarakat untuk menjadi sumber penghasilan, juga karena sebagian besar dari mereka mengeksplorasi tanah miliknya sendiri. Dikhawatirkan ada resistensi atau pertlawanan dari masyarakat pinggiran hutan jika pemerintah daerah menutup penambangan minyak.

Diperlukan penataan yang berkeadilan dari lembaga terkait, agar eksplorasi minyak dengan menggunakan sumur-sumur tradisional tersebut tidak berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan. Rusaknya areal hutan di wilayah Ngambon terutama disebabkan karena kurangnya usaha kerjasama yang seharusnya dibina oleh perhutani dengan masyarakat setempat untuk terlibat dalam berbagai kerjasama yang saling menguntungkan antara warga masyarakat tamping dengan perhutani.

Kerjasama antara masyarakat dengan perhutani, termasuk dengan pemerintah, tampaknya merupakan kegiatan yang tidak bisa ditolak lagi. Salah satu upaya yang banyak dilakukan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat tamping melalui kekuatan inisiatif-inisiatif local, yakni penguatan kapasitas masyarakat berbasiskan pada kekuatan masyarakat itu sendiri. Pola pengembangan ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga *non government* dalam rangka untuk menguatkan kemandirian masyarakat pinggiran hutan. Selain agar tidak terlalu tergantung terhadap lingkungan hutan, terutama pemenuhan kebutuhan ekonominya, juga menghasilkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia. Yang sering menjadi penyebab utama kerusakan hutan bukanlah perbuatan penebangan pohon dari warga local, melainkan karena aktivitas menggembala hewan ternak di lingkungan hutan yang sering memakan bibit-bibit atau pohon yang masih kecil. Karenanya, warga masyarakat memang memerlukan penguatan kapasitas terkait dengan keterlibatan

mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah melalui penjagaan terhadap pohon-pohon yang masih berumur kurang dari 2 tahun dari kerusakan akibat dimakan hewan ternak atau ditebang untuk kepentingan pembukaan area persawahan.

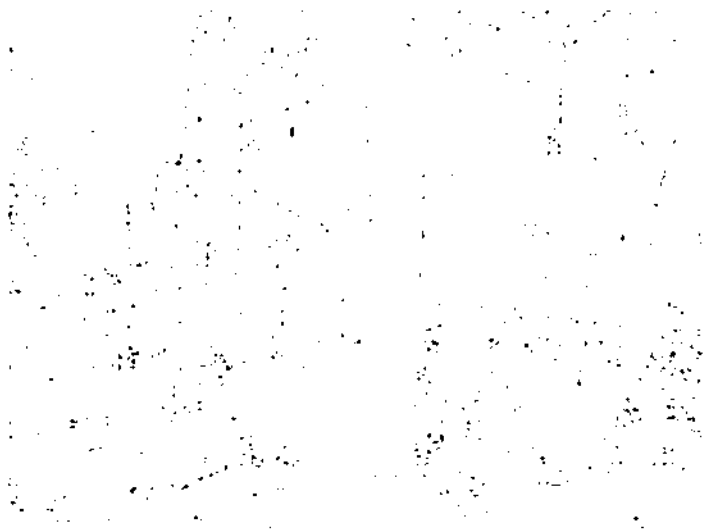


Gambar 3. Pohon-pohon di hutan yang dekat dengan pemukiman penduduk

Warga masyarakat tamping memang memiliki tanggungjawab sosial besar dalam menjaga alam lingkungan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang dibuat oleh keteledoran dan keserakahan manusia. Disamping karena lokasinya yang paling dekat dengan hutan, mereka adalah warga yang secara langsung bersentuhan dengan lingkungan hutan. Melibatkan warga masyarakat tamping dalam menjaga lingkungan hutan lebih efektif dan efisien.

Kendala utama melibatkan warga masyarakat tamping adalah terkait dengan problem pengetahuan, status sosial ekonomi serta

mereka dalam menjaga kestabilan lingkungan. Salah satunya adalah melalui penanaman berbagai pohon-pohon yang masih belum banyak dari 2 tahun dan keusukan akibat dimakan hewan ternak atau dibuang untuk kepentingan pemukiman area perumahan.



Gambar 3. Pohon-pohon di hutan yang dekat dengan pemukiman penduduk

Warga masyarakat tampak memang memiliki tanggungjawab sosial besar dalam menjaga alam lingkungan agar terhindar dari berbagai kerusakan yang dibuat oleh pencemaran dan keserakahan manusia. Disamping karena lokasinya yang paling dekat dengan hutan, mereka adalah warga yang secara langsung bertanggung jawab lingkungan hutan. Melalui warga masyarakat tampak menjaga lingkungan hutan lebih efektif dan efisien.

Kendala utama melibatkan warga masyarakat tampak adalah terkait dengan problem pengetahuan, status sosial ekonomi serta

rendahnya kesadaran warga terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Hal ini karena bagi mereka hutan di sekitar mereka memiliki sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan utama. Karenanya, wajar jika resistensi warga terhadap keinginan agar warga sekitar hutan terlibat dalam pelestarian lingkungan terkendala oleh tradisi yang selama ini mereka miliki. Itulah sebabnya, diperlukan penguatan kapasitas warga sebagai *community development* yang menjadi garda terdepan dalam upaya pelestarian lingkungan, sekaligus memberikan informasi terkait dengan problema lingkungan, termasuk isu *global warming*. Penguatan kapasitas ini dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat tamping yang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan selebihnya adalah kerja serabutan. Dalam table 26 terdapat sejumlah pekerjaan pokok masyarakat tamping yang menjadi objek penelitian ini.

Tabel 26  
PEKERJAAN POKOK

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Petani	106	42,4
2	Buruh Tani	54	21,6
3	Buruh Bagunan	13	5,2
4	Buruh Industri	3	1,2
5	Buruh Sektor Informal lain (pekerja di pertambangan sumur minyak tradisional)	11	4,4
6	Pedagang kecil	21	8,4
7	Lainnya, (serabutan)	42	16,8
	JUMLAH	250	100

Memperhatikan berbagai profesi yang ada, terlihat bahwa mayoritas dari mereka sangat tergantung dari sumberdaya hutan. Kondisi

ini pada masa yang akan datang dikhawatirkan dapat merusak kualitas ekologi yang ada, sehingga memang perlu penguatan kapasitas masyarakat agar terjadi pengalihan profesi yang tidak lagi bersandarkan pada sumberdaya hutan.

Dengan demikian penguatan kapasitas ini juga bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan hutan, agar tidak dirusak oleh aktivitas ekonomi warga. Berbagai alternative memang banyak dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan hutan, selain penguatan kapasitas masyarakat, juga disebarluaskannya berbagai famlet dan poster terkait dengan kelestarian lingkungan juga dilakukan.

Yang menarik adalah keterlibatan masyarakat tamping dalam LMDH ternyata justru memberikan kontribusi positif bagi partisipasi aktif mereka dalam melestarikan lingkungan hutan yang ada. Keterlibatan ini tentu saja perlu dioptimalisasikan. Salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan kapasitas masyarakat hutan melalui pembentukan Forum Warga yang terbentuk melalui FGD (*Focus Group Discussi*) terkait dengan pengelolaan lingkungan hutan. Melalui FGD yang pernah dilakukan sejumlah lembaga terkait dengan peran serta warga memang menunjukkan bentuk-bentuk kesadaran atas pentingnya pelestarian hutan yang dilakukan oleh warga setempat. FGD ini berfungsi memperoleh informasi terkait dengan pengetahuan warga tentang pelestarian lingkungan beserta upaya yang pernah mereka atau lembaga lain lakukan terkait dengan pelestarian lingkungan tersebut.



Pengelolaan lingkungan hutan serta penyebarluasan informasi pelestarian hutan menjadi efektif jika melibatkan masyarakat tamping sebagai subjek, bukan objek. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan hutan di sekitar mereka akan memunculkan sikap memiliki hutan sebagai bagian penting dalam kehidupannya. Bagi Kasdi, LMDH yang ada di wilayah Kedewan merupakan salah satu contoh lembaga local yang selama ini aktif dalam membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan warga serta menjadi mediasi antara warga dengan pihak pengelola hutan terkait dengan keinginan warga untuk mengelola *recek* yang ada di sekitar hutan tersebut.

Lembaga-lembaga local, baik formal maupun non formal terutama yang bersifat *bottom up* memang masih memerlukan pedampingan dari lembaga lain yang *concern* dalam menangani isu lingkungan hidup. Hal ini karena keterbatasan SDM yang mereka miliki sehingga meminimalisir keterlibatan warga secara lebih optimal.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Isu pemanasan global atau *global warming* yang telah menjadi isu dunia ternyata tidak serta merta dipahami oleh masyarakat sekitar hutan di Bojonegoro dan Tuban atau disebut sebagai masyarakat tamping. Masyarakat tamping sebagai masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung dari sumberdaya hutan seharusnya menjadi bagian warga dunia yang merespon isu tersebut. Hal ini karena *global warming* muncul salah satunya karena kian rusaknya kelestarian hutan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Namun demikian, dalam kenyataannya masyarakat tamping justru merupakan masyarakat yang tidak pernah merespon isu *global warming* atau bersikap apatis. Banyak factor yang menyebabkan rendahnya respon masyarakat tamping tersebut. Salah satu factor terbesarnya adalah kendala penguasaan bahasa yang dimiliki oleh masyarakat tamping. Sebagai masyarakat pinggiran, mereka adalah komunitas yang setiap harinya menggunakan bahasa Jawa (ngoko dan kromo) untuk komunikasi sehari-hari. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya sarana pemerolehan informasi semakin menyulitkan masyarakat tamping dalam menerima informasi tentang *global warming*.

Hal ini bisa dimaklumi karena hampir keseluruhan arus informasi terkait dengan isu pelestarian lingkungan dan *global warming*

menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh mereka. Di samping itu akses untuk memperolehnya saja mereka juga mengalami kesulitan. Aktivitas di tengah hutan yang begitu menyita waktu mengakibatkan konsentrasi kehidupannya lebih banyak dilakukan di luar rumah pada siang harinya. Praksis mereka tidak begitu peduli terhadap berbagai informasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan kebutuhan kehidupan mereka.

Jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat tamping tentu saja wajar jika mereka apatis terhadap isu *global warming*. Di samping tingkat pendidikan yang rendah, juga problema penguasaan bahasa yang banyak menjadi kendalanya. Rendahnya tingkat pendidikan menjadikan isu *global warming* mengalami kesenjangan pengetahuan dari *common sense* yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagi mereka, bagaimana mendapatkan manfaat dari sumberdaya hutan apa adanya sudah cukup tanpa harus melakukan kegiatan-kegiatan eksploitatif. Kesenjangan pengetahuan ini menjadikan isu *global warming* memiliki jarak pengetahuan masyarakat tamping. Mereka merasa asing dengan istilah tersebut sekaligus juga berkeyakinan bahwa isu *global warming* itu tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari.

Diperlukan media yang efektif dan mudah diterima oleh masyarakat setempat dalam rangka pemerolehan informasi tentang pelestarian lingkungan dan isu *global warming*. Media itu haruslah memiliki kedekatan emosi dengan masyarakat tamping serta dengan menggunakan bahasa

yang akrab dengan komunikasi mereka. Salah satu yang diperlukan adalah penguatan kapasitas local dan inisiatif local dalam rangka memberdayakan masyarakat tamping agar memiliki kemandirian dalam memperoleh akses informasi, yakni semacam penguatan forum-forum non formal yang banyak berkembang dalam masyarakat tamping.

## **B. SARAN**

Masalah dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka upaya pelestarian lingkungan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Ada beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk memberdayakan masyarakat mengelola lingkungan hidupnya :

1. Mengembangkan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungannya.

2. Mengembangkan kerjasama yang intensif dengan media massa dalam hal sosialisasi dan pemberitaan mengenai peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
3. Memberikan apresiasi terhadap kelompok masyarakat yang berhasil mengelola lingkungannya.
4. Pengintegrasian aliansi mitra strategis ke dalam program lingkungan dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi tawar (*bargaining power*) dalam hal isu lingkungan.
5. Terpenting dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah masyarakat sadar sebagai bagian dari lingkungan dimana ia berada, tumbuhnya kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, yang pelan – pelan diharapkan akan menjadi budaya "Cinta Lingkungan" yang tumbuh di setiap sanubari warga masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2008. *Jawa Timur dalam Angka*. Surabaya: BPS.
- BPS. 2009. *Kecamatan kedewan dalam Angka*. Bojonegoro: BPS
- BPS. 2009. *Kecamatan Ngambon dalam Angka*. Bojonegoro: BPS
- BPS. 2009. *Kecamatan Kasiman dalam Angka*. Bojonegoro: BPS
- BPS. 2008. *Bojonegoro dalam Angka*. Bojonegoro: BPS.
- Christal, David. 1992. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. New York: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Daeng, Hans, 2000, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Laksono, PM, dkk, 2000, *Menjaga Alam Membela Manusia*, Yogyakarta: Lafadf
- .....dkk, 2004, *Ken Sa Faak, Benih Benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*, Yogyakarta: Insist Press
- Pringgawidagdo, Suwarno. 2009. *Strategi Penguasaan Berbahasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Rivers, William L., Jay W. Jensen, Dan Theodore Petersen. 2004. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, Bagong dan Jalal. 2001. *Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat Desa Di Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, Bagong dan Septi Ariadi. 2009. *Rencana Implementasi Pengembangan Ekologi Alam Kepulauan Di Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Suyanto, Bagong dan Kamaji. 2004. *Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Wahono, Francis, AB. Widyanta dan Titus O. Kusumajati (ed), 2004, *Pangan, Kearifan Lokal dan Keragaman Hayati*, Yogyakarta: Pustaka Rakyat Cerdas Cinderalas

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA**

Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 031-5035676, 5033080, Faks. 031-5035807  
E-mail : [fsas@unair.ac.id](mailto:fsas@unair.ac.id) / E-mail : [sasindofsas@unair.ac.id](mailto:sasindofsas@unair.ac.id)

Nomor : 003/S. Ind.-FIB/VIII/2009 Surabaya, 11 Agustus 2009  
Hal : Izin kegiatan penelitian tentang  
Kendala Pemerolehan Informasi Seputar *Global Warming* pada Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

Yth. Bupati Kepala Daerah TK II  
Kabupaten Tuban  
Di Tuban

Dengan hormat,

Diberitahukan bahwa kami, staf pengajar Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga mempunyai rencana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: *Kendala Pemerolehan Informasi Seputar Issue Global Warming pada Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban*. Kegiatan tersebut menurut rencana akan kami laksanakan pada rentang waktu antara Bulan Agustus 2009 hingga November 2009.

Schubungan dengan hal tersebut kami berharap agar dapat diberikan izin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

Demikian pemberitahuan dan permohonan izin yang kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Peneliti,

Moch. Jalal, S.S., M.Hum.  
NIP. 132 161 180



Mengetahui:  
Ketua LPPM Universitas Airlangga,

Prof. Dr. Bambang Sektiari L., DEA., drh.  
NIP. 131 837 004





IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
**BAKESBANGPOL DAN LINMAS**  
Jl. Trunojoyo No. 12 Telepon (0353) 881826-151  
**BOJONEGORO**

Bojonegoro, 21 Agustus 2009

Kepada Yth :

1.Sdr. Camat Kedewan

2.Sdr. Camat Kasiman

3.Sdr. Camat Ngambon

Di

BOJONEGORO

SURAT-PENGANTAR

Nomor : 072 / 250 / 204.412 / 2009

Dasar :

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Dan Kantor Kab.Bojonegoro
2. Surat Edaran Bupati Bojonegoro No. 188/1896/412.12/2005 tanggal 10 November 2005 Tentang Pemrosesan Perijinan.
3. Surat Ketua LPPM Universitas Airlanga No.003/S.Ind-FIB/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 perihal permohonan ijin penelitian

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama : Moch. Jalal, S.S.,M.Hum (Peneliti Utama)
2. Anggota : - Kaenaji ,S.Sos, M.Si  
- Listiyono Santoso, S.S.,M.Hum
3. Fakultas : Fakultas Ilmu Budaya
4. Tema : Perubahan Iklim,Pelestarian Lingkungan,Keanekaan Hayati  
Problematika Kendala Pemcrolehan Informasi Verbal,Seputar Issue Global Warning ,Bagi masyarakat Monolingual Sekitar Hutan di Kab.Bojonegoro dan Tuban
5. Waktu : Tmt 21 Agustus s/d 21 Nopember 2009

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas untuk kepentingan penelitian,dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Kecamatan/Kantor Instansi setempat.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum/instansi setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan tugas diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Kecamatan/Kantor Instansi setempat mengenai selesainya pelaksanaan tugas tersebut sebelum meninggalkan daerah tempat dimaksud.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah melakukan tugasnya diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bojonegoro.
7. Surat pengantar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat pengantar ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dipegunakan sebagaimana mestinya

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kabid.Pengmas Strada

Drs. Bowo Trilaksana, M.Si  
Pembina  
NIP. 19600606 197907 1 006

Tembusan Yth :

1. Sdr. Ketua LPPM Universitas Airlanga
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

## KUESIONER

### PROBLEMATIKA KENDALA PEMEROLEHAN INFORMASI VERBAL SEPUTAR ISSUE GLOBAL WARMING, BAGI MASYARAKAT MONOLINGUAL SEKITAR HUTAN DI KABUPATEN BOJONEGORO DAN TUBAN

#### Kata Pengantar

Kami adalah Tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Airlangga. Kami sedang melakukan kajian dengan judul Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

Kami berharap bapak/ibu bersedia menjadi informan penelitian ini dan memberikan informasi yang kami butuhkan. Hasil penelitian ini akan disampaikan pada Pemda Propinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Bojonegoro dan Tuban untuk dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam merumuskan program pelestarian lingkungan hutan, terutama yang melibatkan masyarakat di daerah sekitar hutan.

Atas kesediaan bapak/ibu menyediakan waktu luang untuk kegiatan wawancara ini kami sampaikan terimakasih.

No.	Pertanyaan	Koding
<b>A. Lokasi Penelitian</b>		
01.	Keturahan/Desa :.....	1 ( )
02.	Kecamatan :.....	2 ( )
03.	Kota/Kabupaten :.....	3 ( )
<b>B. Identitas Informan</b>		
04.	Jenis kelamin informan: 1. Laki-laki                      2. Perempuan	4 ( )
05.	Umur informan:..... tahun.	5 ( )

LPPM Unair \_\_\_\_\_

**Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban**

06.	Pendidikan terakhir informan: 1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat Sekolah Dasar 3. Tamat Sekolah Dasar	6 ( )
07.	Pekerjaan pokok informan: 1. Petani 2. Buruh tani 3. Buruh bangunan 4. Buruh industri 5. Buruh sektor informal lain 6. Pedagang kecil 7. Lainnya(sebutkan),.....	7 ( )
08.	Usaha sampingan selain pekerjaan utama: 1. .... 2. Tidak memiliki	8 ( )
09.	Apakah keluarga informan termasuk keluarga penerima BLT: 1. Ya 2. Tidak	9 ( )
10.	Rata-rata penghasilan keluarga informan per bulan:.....rupiah	10 ( )
<b>C. Kondisi Kebahasaan dan Kepemilikan Sarana Informasi</b>		
11.	Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari: 1. Bahasa Jawa (Ngoko/Kromo) 2. Bahasa Indonesia 3. Bahasa Campuran Jawa & Indonesia 4. Lain, sebutkan .....	11 ( )
12.	Pemahaman terhadap bahasa Indonesia: 1. Sangat kurang 2. Kurang 3. Pas-pasan 4. cukup	12 ( )
13.	Kondisi kompetensi terhadap penggunaan bahasa Indonesia: 1. Memiliki kompetensi aktif 2. Hanya sebatas pendengar pasif 3. Tidak memiliki kompetensi	13 ( )
14.	Sarana informasi elektronik sejenis radio/televisi yang dimiliki di rumah: 1. Punya, Sebutkan: .....	14 ( )
15.	Sarana informasi nonelektronik sejenis koran/majalah yang dimiliki di rumah: 1. Punya, sebutkan: .....	15 ( )

LPPM Unair \_\_\_\_\_

**Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban**

16.	Sarana informasi di atas (elektronik maupun nonelektronik) yang dapat menjangkau Informan dalam memperoleh informasi (walaupun bukan milik sendiri): 1. Sebutkan, .....	16 ( )
<b>D. Pemahaman Terhadap Issue Seputar Global Warming</b>		
17.	Bagaimanakah pemahaman informan tentang fungsi dan peranan hutan bagi kehidupan mereka? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	17 ( )
18.	Bagaimanakah pemahaman informan terhadap masalah pemeliharaan lingkungan hidup, khususnya hutan? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	18 ( )
19.	Bagaimanakah pemahaman informan tentang pentingnya kesadaran terhadap masalah pemeliharaan lingkungan hidup, khususnya hutan? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	19 ( )
20.	Bagaimanakah pemahaman informan tentang peran serta masyarakat dalam ikut memelihara lingkungan hutan? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	20 ( )

**Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban**

<p>21.</p>	<p>Bagaimanakah pemahaman informan tentang batasan mengenai apa saja yang <u>boleh</u> dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sarana menunjang kehidupan sehari-hari.                  Deskripsikan:.....                  .....                  .....                  .....</p>	<p>21 ( )</p>
<p>22.</p>	<p>Bagaimanakah pemahaman informan tentang batasan mengenai apa saja yang <u>tidak boleh</u> dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan hutan sebagai sarana menunjang kehidupan sehari-hari.                  Deskripsikan:.....                  .....                  .....                  .....</p>	<p>22 ( )</p>
<p>23</p>	<p>Aktivitas komersial informan yang selama ini secara langsung bersinggungan dengan hutan meliputi:                  Deskripsikan:.....                  .....                  .....                  .....</p>	<p>23 ( )</p>
<p>24.</p>	<p>Aktivitas yang berhubungan dengan hutan yang selama ini dianggap ikut berperan dalam melestarikan lingkungan hutan:                  Deskripsikan:.....                  .....                  .....                  .....</p>	<p>24 ( )</p>
<p>25.</p>	<p>Aktivitas yang berhubungan dengan hutan yang selama ini dianggap merusak lingkungan hutan:                  Deskripsikan:.....                  .....                  .....                  .....</p>	<p>25 ( )</p>

**Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar *Issue Global Warming*, Bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban**

<b>E. Persoalan Pemerolehan Informasi Seputar Pelestarian Lingkungan Berikut Kendala yang Ada.</b>		
26.	Apakah informan pernah mendengar istilah seputar pemanasan global? 1. Pernah 2. Tidak pernah	26 ( )
27.	Jika pernah, deskripsikan sejauh mana pemahaman informan tersebut. ..... ..... .....	27 ( )
28.	Bagaimanakah peran media cetak dan elektronik yang dapat dijangkau informan (TV, radio, koran, majalah, dll) dalam memberikan informasi seputar persoalan pelestarian lingkungan hutan? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	28 ( )
29.	Dari berbagai media informasi di atas, manakah yang dianggap paling berperan dalam memberikan informasi seputar persoalan pelestarian lingkungan hutan, serta sejauh manakah peranannya? Deskripsikan:..... ..... .....	29 ( )
30.	Dari berbagai media informasi di atas, manakah yang dianggap lebih efektif dan lebih mudah pemahamannya? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	30 ( )
31.	Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi informan dalam memperoleh informasi seputar pelestarian lingkungan hidup lewat sumber media elektronik maupun cetak? Deskripsikan:..... ..... ..... .....	31 ( )







**BIOGRAFI / DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI****A. Ketua Pelaksana**

1. Nama lengkap dengan gelar : Moch. Jalal, S.S., M.Hum.  
 2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 40 Tahun/Pria/ Islam  
 3. Alamat (Bagian, Fakultas) : Sastra Indonesia Fakultas Sastra  
 4. Pangkat/Golongan/NIP : Lektor Kepala /III-D/132 161 180  
 5. Jabatan Pokok : Dosen  
 6. Kesatuan/Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga Surabaya  
 7. Alamat Kantor : JL Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya  
 8. Riwayat Pendidikan Tinggi :

NO	MACAM PENDIDIKAN	TEMPAT	TAHUN	BIDANG SPESIALISASI	GELAR
1.	Universitas Airlangga	Surabaya	1988 – 1993	Linguistik (Sosiopragmatik)	S. S.
2.	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	2003 - 2006	Linguistik (Sosiopragmatik)	M. Hum.

**9. Pengalaman penelitian**

NO.	TAHUN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	KETERANGAN
1.	1993	Analisis Sociolinguistik Bahasa Walikan Di Kalianyar, Kapas, Bojonegoro	Mandiri	Peneliti
2.	1995	Eksistensi Bahasa Daerah Jawa Di kalangan Remaja Kota Etnis Jawa Di Surabaya	DIP OPF	Anggota Peneliti
3.	1996	Studi Tentang Potensi Tenaga Kerja Di Bidang Pariwisata	DEPARPOSTEL	Anggota Peneliti
4.	1997	Bentuk Direktif Bahasa Jawa (Jawa Timur)	DEPDIKBUD	Anggota Peneliti
5.	1997	Pelacuran Anak Wanita Di Kota Surabaya (Studi kasus di kompleks lokalisasi Dolly dan Jarak)	Yayasan Kusuma Buana dan Puslit Atmajaya	Anggota Peneliti
6.	1997	Pemetaan Produk Unggulan Di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 1997/1998	BPPD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan	Anggota Peneliti
7.	1998	Pemakaian Majas Pada masa Orde	Dana Rutin Unair	Anggota Peneliti

		<b>Reformasi: Sebuah Kajian Semantik</b>	<b>1998/1999</b>	
8.	1999	<b>Tindak Kekerasan Anak Di Jawa Timur</b>	<b>LPA Jawa Timur</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
9.	1999	<b>Tindak Kekerasan Seksual Anak Wanita Di Jawa Timur</b>	<b>LPA Jawa Timur</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
10.	2000	<b>Problematika Kesalahan Penulisan Surat Menyurat Dinas Desa yang Dilakukan Pelaksana Administrasi Di Desa-Desa Tertinggal</b>	<b>Dana Rutin Unair 2000/2001</b>	<b>Ketua Peneliti</b>
11.	2001	<b>Pengkajian tentang BUMN-BUMN yang Memiliki Nilai Strategis Di Wilayah Propinsi Jawa Timur</b>	<b>Balitbang Jatim</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
12.	2001	<b>Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat Desa Di Propinsi Jawa Timur</b>	<b>Pemda Jatim</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
13.	2001	<b>Penyusunan Mekanisme Penyaluran dan Pola Pemanfaatan Kredit Usaha Tani (KUT) yang Berorientasi pada Pemberdayaan Petani Kecil</b>	<b>Balitbang Jatim</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
14.	2001	<b>Kesetaraan Gender Cerita Anak-Anak Klasik Produksi Walt Disney dan Cerita Anak-Anak Klasik Indonesia</b>	<b>BPPKSDM Ditjen Dikti, Depdiknas</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
15.	2001	<b>Pengembangan Masyarakat Kepulauan Jawa Timur</b>	<b>Pemda Jatim</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
16.	2004	<b>Kendala-kendala Learner Non-Native Speakers Ketika Belajar Bahasa Indonesia Pada Program BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)</b>	<b>BPPKSDM Ditjen Dikti, Depdiknas</b>	<b>Ketua Peneliti</b>
17.	2005	<b>Kajian Potensi Pemakaian Struktur Kalimat Non Imperatif dan Performatif untuk Fungsi Direktif dalam Bahasa Jawa</b>	<b>BPPKSDM Ditjen Dikti, Depdiknas</b>	<b>Anggota Peneliti</b>
18.	2007	<b>Kajian Kualitatif Dan Kuantitatif Kekerabatan Bahasa-Bahasa Minahasa Di Propinsi Sulawesi Utara</b>	<b>DIPA PNBP Unair</b>	<b>Ketua Peneliti</b>
19.	2008	<b>Kajian tindak tutur direktif bahasa jawa suroboyoan</b>	<b>Depdiknas</b>	<b>Ketua Peneliti</b>

#### 10. Publikasi Hasil Penelitian

**a. Jurnal atau Majalah Ilmiah**

1. "Nasionalisme Bahasa Indonesia dan Kompleksitas Persoalan Sosial Politik", diterbitkan dalam: Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair, Tahun XIV, Nomor 1, Januari 2001, ISSN: 0216-2407.
2. "Pemudaran Seni Tradisional di Surabaya Serta Upaya Revitalisasi", diterbitkan dalam: Prasasti Jurnal Ilmu Sastra dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, Vol. 50, Agustus 2003, ISSN: 0853-6880.
3. "Kontradiksi Logika Filsafat dengan Logika Simbolisasi Bahasa", diterbitkan dalam: Mozaik Jurnal Ilmu Humaniora, FIB, Unair, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2007, ISSN: 1412-999x.
4. "Praktik Diskursif 'The Theory of Truth' Michel Foucault dalam Konstruksi Simbolisasi Bahasa di Indonesia", diterbitkan dalam: Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair, Tahun XX, Nomor 3, Juli 2007, ISSN: 0216-2407.
5. "Eksplorasi Simbol-Simbol Seksualitas Perempuan dalam Iklan Majalah Playboy Indonesia", diterbitkan dalam: Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair, Tahun XXI, Nomor 1, Januari 2008, ISSN: 0216-2407.

**b. Buku yang Diterbitkan**

1. "Budaya dan Pembangunan, Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Desa Di Propinsi Jawa Timur". Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-9493-21-8, Tahun 2001
2. "Kajian Otonomi Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Jawa Timur". Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-9493-38-2, Tahun 2002.
3. "Menakar Prospek Pengembangan Badan Usaha Milik Desa". Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-9493-30-7, Tahun 2002.
4. "Perencanaan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Lokal Di Kota Surabaya". Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-9493-40-4, Tahun 2002.
5. "Penentuan Prioritas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Di Jawa Timur". Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-24-5309-1, Tahun 2006.
6. "Studi Tentang Pola Perilaku Memilih dan Aspirasi Politik Masyarakat Terhadap Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Pilkada." Buku Diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-24-5319-9, Tahun 2006.
7. "Pengusunan Perencanaan Sarana Pendidikan Menengah Di Kabupaten Probolinggo." Buku diterbitkan oleh: Lutfansah Mediatama: Surabaya, ISBN: 979-24-5312-1, Tahun 2006.

Surabaya, 30 Maret 2009  
Kepala Peneliti,

Moch. Jalal, S.S., M. Hum.  
NIP 132161180

## B. Anggota Peneliti

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Kamaji, S.sos, M.Si.   |
| 2. NIP                  | : 132 162 037  |
| 3. Jenis Kelamin        | : Laki-Laki  |
| 4. Tempat/Tanggal lahir | : Jombang, 21 April 1968   |
| 5. Alamat               | : - Wisata Bukit Mas 2<br>Zona Palais Du Luxembourg E1A Nomor<br>22 Surabaya<br>(031) 711 95 469, Hp. 08123564069<br>Email: kamaji_fisipua@yahoo.com |
| 6. Agama                | : Islam  |
| 7. Pendidikan           | : S1 Sosiologi Universitas Airlangga<br>S2 Ilmu Ilmu Sosial Universitas Airlangga  |
| 8. Pekerjaan            | : Dosen Tetap FISIP Unair  |

### KARIER DI BIDANG KEAHLIAN

1995 - sekarang : Dosen Program Studi Sosiologi FISIP Unair

### Karya Tulis Buku

Karnaji,, "GKG Jalan Di Tempat" dalam: Bambang Parianom & A. Masyhur Effendi (ed.), 1998. *GKD: Paradigma, Strategi dan Langkah Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan*. Surabaya: Lembaga Studi Kewirausahaan Bekerjasama dengan Penerbit Alumni.

Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. *Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.

Bagong Suyanto dan Karnaji, 2000. *Pengkajiaan dan Pengembangan Implementasi GERDU TASKIN Di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansa..

Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak..* Surabaya: Lutfansa

Sri Sanituti Hariadi dan Karnaji,. " *Pertindungan Sosial dan Pemberdayaan*" dalam: Bagong Suyanto, 2000 *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penangannya..* Surabaya: Lutfansa

Sri Sanituti Hariadi , Bagong Suyanto dan Karnaji,. *Kejahatan dan Aksi Kekerasan Kolektif*: Lutfansa, 2000

Karnaji dan Bagong Suyanto dkk., 2001. *Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya..* Surabaya: Lutfansa

Bagong Suyanto dan Karnaji (ed), 2002. *Menata PKL dan Bangunan Liar*. Surabaya: Lutfansa

Bagong Suyanto dan Karnaji (ed), 2002. *Menakar Peran Serta Masyarakat Dalam memajukan Pendidikan di Kabupaten Jombang*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. *Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tugu Pahlawan*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003.*Rencana Induk Program Pengendalian Pengendalian Urbanisasi dan Penanganan PMKS di Propinsi Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. *Pendataan Masalah Sosial (Anak Jalanan di Kota Surabaya: Isu Prioritas dan Program Penanganannya)*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. *Kesenjangan Masalah Sosial yang Timbul dan Upaya Penanggulangannya*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. *Studi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya: Lutfansa.

Bagong. Suyanto dan Karnaji, (ed) 2003. *Profil dan Dinamika Sosial Penduduk Kecamatan Bulak*.

Sri Sanituti Hariadi dan Karnaji,. " *Pertindungan Sosial dan Pemberdayaan*" dalam: Bagong Suyanto, 2000 *Pekerja Anak: Masalah, Kebijakan dan Upaya Penangannya*. Surabaya: Lutfansah

Mustain, Bagong Suyanto dan Karnaji 1998. *Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur*. Surabaya: Airlangga University Press Bekerjasama dengan UNICEF.

Bagong Suyanto dan Karnaji, 2000. *Pengkajiaan dan Pengembangan Implementasi GERDU TASKIN Di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur*. Surabaya: Lutfansa..

Bagong Suyanto dan Karnaji dkk., 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*. Surabaya: Lutfansa

Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2000. *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*. Surabaya: Lutfansa dan Ford Foundation.

Bagong Suyanto & Karnaji, 2002. *Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Bagong Suyanto & Karnaji, 2003. *Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Bagong Suyanto & Karnaji, 2004. *Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia di Kaupaten Bojonegoro*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Suyanto, Bagong & Karnaji (eds.), 2004. *Life Dynamics Basic Training Bagi Kelompok Anak Jalanan dan Anak Nakal di Kota Surabaya*. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. **KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin**. Surabaya: Airlangga University Press.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. **Pendataan PMKS Di Surabaya pemetaan Problema Dan Pengembangan Program Penanganan Lansia Di Kota Surabaya**. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. **Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Di Provinsi Jawa Timur**. Surabaya: Lutfansah Mediatama

## **Jurnal**

Karnaji, 1999. *Anak Jalanan dan Upaya Penanganannya*. Surabaya: Jurnal Hakiki

Karnaji, 2001. *Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak jalanan*. Surabaya: Jurnal Penelitian Dinamika Sosial.

Karnaji, 2002. *Anatomi Anak Jalanan Di Kota Surabaya*. Surabaya: Jurnal Hakiki.

Karnaji, 2002. *Penataan Kota, Kemiskinan dan Eksistensi PKL*. Surabaya: Jurnal Kesra.

Karnaji, 2002. *Potensi dan Eksistensi PKL: Kasus Surabaya*. Surabaya: Jurnal Soroboyo.

Karnaji, 2003. *Kota Surabaya Dalam Jaringan Era Global*. Surabaya: Jurnal Suroboyo.

Karnaji, 2005. *Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan*. Surabaya: Jurnal Sosiologi Dialektika FISIP Universitas Airlangga.

Karnaji, 2003. *Konflik Tanah Perkebunan di Malang Selatan*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga.

Karnaji, 2003. *Anthony Giddens: Suatu Pengantar*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Karnaji, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan peluang*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Karnaji, 2005. *Kalangan Marjinal Di Perkotaan Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

Karnaji, 2005. *Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenalkan BBM*. Surabaya: Jurnal Masyarakat kebudayaan dan Politik Universitas Airlangga

## Pengalaman Penelitian

No	Judul	Sumber Dana	Tahun
1.	Mata Rantai Pemasaran Tembakau Virginia	Dikti	1995
2.	Community Support System Wanita Bekerja	BKKBN Pusat	1996
3.	Pengkajian Daerah yang Mendapat IDT di Propinsi Jawa Timur	Bappeda Tk I Jatim	1996
4.	Evaluasi dan Monitoring Kesiapan Daerah Tingkat II dalam Pelaksanaan GKD	Bappeda Tk I Jatim	1996
5.	Peranan Bidan Desa Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera di Pedesaan	BKKBN Pusat	1996
6.	Pemetaan Produk Unggulan Propinsi Jawa Timur Dalam Rangka GKD	Bappeda Tk I. Jatim	1996

7.	Evaluasi dan Penyusunan Model Pengembangan Pilot Project Produk Unggulan di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1996
8.	Perawatan Kesehatan dan Pola Kematian Bayi di Kalangan Penduduk Pra-Sejahtera dan Sejahtera I di Kecamatan Miskin	BBI	1996
9.	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Program Bappeda Tk. I Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1996
10.	Evaluasi dan Kendala Pelaksanaan Program IDT di Kabupaten Lamongan	Bappeda Tk II. Lamongan	1996
11.	Studi Kesiapan dan Penyusunan Model Pemasyarakatan Gagasan Honey Years dan Ide Satu Keluarga Satu Balita di Kalangan Generasi Baby Boomers di Jawa Timur	BKKBN Jatim	1997
12.	Studi Pengembangan Model Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Wanita di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
13.	Studi Pengembangan Pendapatan Nelayan di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
14.	Pemetaan Produk Unggulan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyuwangi	Bappeda Tk II Banyuwangi	1997
15.	Pemetaan dan Penyusunan Program Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Tk. II Blitar	Bappeda Tk II. Blitar	1997
16.	Profil Pendidikan di Desa IDT dan Penyusunan Rencana Pembinaan Pelajar Putus Sekolah di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1997
17.	Penyusunan Rencana Jangka Menengah Program Pengembangan Wilayah Terpadu di Kecamatan Bancar, Jatirogo, Kenduruhan dan Senori	Bappeda Tk II. Tuban	1997
18.	Studi Evaluasi dan Penyusunan Program Penghapusan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1998
19.	Penyusunan Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Potensial di Kotamadya Surabaya	Bappeda Tk II Kodya Surabaya	1998
20.	Studi Kualitatif Pekerja Anak di Jawa Timur	UNICEF	1998
21.	Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar di Jawa Timur	UNICEF	1998
22.	Perencanaan Fasilitas Kesehatan di Kotamadya Surabaya	Bappeda Tk II Kodya Surabaya	1999
23.	Evaluasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Jawa Timur	Bappeda Tk I. Jatim	1999
24.	Gerakan Terpadu (GERDU) Pengentasan Kemiskinan di Jawa Timur	Balitbang da Jatim	1999
25.	Pemetaan Anak Jalanan di Kota Surabaya	Depsos Pusat	1999
26.	Eksplorasi Pekerja Anak Di Sektor Perkebunan Komersial	Mandiri	1999
27.	Pekerja Anak di Sektor Berbahaya Di Jawa Timur	UNICEF	2000
28.	Pengkajian dan Pengembangan Implementasi Program GERDU TASKIN di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur	Balitbang da Jatim	2000



29.	Pengembangan Masyarakat di Sekitar Pertambangan GAS di Pulau Pagerungan Besar Kecamatan Sapeken Sumenep Madura	Atlantic Richfield Bali North Inc (BP) Indonesia	2000
30.	Studi Tentang Pola, Latar Belakang dan Implikasi Sosial Terjadinya Tindak Kekerasan Kolektif Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan di Jawa Timur	Mapolda Jatim	2000
31.	Penelitian Penyusunan Mekanisme Penyaluran dan Pola Pemanfaatan KUT yang Berorientasi pada Pemberdayaan Petani Kecil	Balitbangda Jatim	2001
32.	Penelitian dan Pengkajian BUMN-BUMN yang Memiliki Nilai Strategis	Balitbangda Jatim	2001
33.	Studi Penyusunan Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan	Ditjen Dikti	2001
34.	Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Di Kota Surabaya	Bapeko Surabaya	2001
35.	Program Penanganan Pekerja Anak Di Sektor Berbahaya Di Jawa Timur	Bappeprov Tk	2001
36.	Rencana Implementasi Pengembangan Kepulauan Propinsi Jawa Timur	Bappeprov Tk	2001
37.	Budaya dan Pembangunan; Pemberdayaan Lembaga Adat, Adat-Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat Desa di Propinsi Jawa Timur	Biro Pemerintahan Propinsi Jawa Timur	2001
38.	Penelitian Kinerja Aparat Penegak Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Keberadaan PKL dan Bangunan Liar	Balitbang kota Surabaya	2002
39.	Identifikasi Potensi dan Kendala yang Menghambat Upaya Pengembangan Peran Pasar Sebagai salah satu Sumber PAD Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2002
40.	Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Blitar 2003-2007	Bappeda Blitar	2002
41.	Evaluasi Program Pengembangan Kecamatan Di Jawa Timur	Bappreprov Tk	2002
42.	Penelitian Peran Serta Masyarakat Dalam Rangka Memajukan Pendidikan Di Kabupaten Jombang	Balitbang Jombang	2002
43.	Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2002
44.	Kajian Otonomi Perguruan Tinggi: Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Jawa Timur	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2002
45.	Pasar di Era Otonomi Daerah: Pemberdayaan Pasar Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2002
46.	Nilai-Nilai Budaya dan Kesenian Lokal di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2002
47.	Idiologi Feminisme Gerakan Buruh di Kota Surabaya	Dirjen Dikti	2002

48.	Pertindungan Sosial dan Sumbangan Ekonomi Pekerja Anak di Sektor Perkebunan Komersial	Dirjen Dikti	2002
49.	Studi tentang Penyusunan Model Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan	Dirjen Dikti	2002
50.	Menakar Prospek Pengembangann Badan Usaha Milik Desa	Biro Pemeritahan Propinsi Jawa Timur	2002
51.	Kesenjangan Masalah Sosial yang Timbul dan Upaya Penanggulangannya	Dinas Sosial Surabaya	2002
52.	Profil dan Dinamika Sosial Penduduk Kecamatan Bulak	Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	2002
53.	Penyusunan Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
54.	Penyusunan Indeks Kemiskinan Manusia di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
55.	Penyusunan Perencanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Tugu Pahlawan	Bappeko Surabaya	2003
56.	Pengkajian dan Pengembangan Model Binaan Program Gerdu Taskin di Propinsi Jawa Timur	Balitbang Jawa Timur	2003
57.	Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2003
58.	Penyusunan Program Perbaikan Kinerja Birokrasi Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jawa Timur	2003
59.	Rencana Induk Program Pengendalian Pengendalian Urrbanisasi dan Penanganan PMKS di Propinsi Jawa Timur	Biro Kesra Sekda Propinsi Jawa Timur	2003
60.	Pendataan Masalah Sosial (Anak Jalanan di Kota Surabaya: Isu Prioritas dan Program Penanganannya)	Dinas Sosial dan Pemberdayaa n Perempuan Kota Surabaya	2003
61.	Penelitian rencana Penghapusan SPP pada Jenjang Pendidikan dasar di Propinsi Jawa Timut	Balitbang Propinsi Jawa Timur	2003
62.	Penyusunan Proyeksi Kondisi Sosial Ekonomi Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
63.	Penyusunan Standar Pelayanan Minimam (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003
64.	Raperda Penataan Biroktasi di Kabupaten Blitar	Balitbang Blitar	2003

65.	Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
66.	Studi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2003
67.	Penyusunan Raperda Cagar Budaya di Kota Surabaya	Bappeko Surabaya	2003
68.	Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Propinsi Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2004
69.	Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Nelayan Tradisional Jawa Timur	Balitbang Jatim	2004
70.	Pemetaan Dan Pengembangan Program Penanganan Pelacuran Di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
71.	Anak Jalanana dan Anak Nakal di Kota Surabaya	Dinsos Surabaya	2004
72.	Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2004
73.	Kajian Eksploratif Terhadap Penyandang Masalah dan Potensi Kesejahteraan Sosial Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Dalam Menangani Masalah Sosial di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2004
74.	Studi di Teluk Bintuni Papua	BP Indonesia	2005
75.	Analisis Peran Perempuan Dalam Kewirausahaan Guna Mendukung Kegiatan Eksplorasi Migas Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
76.	Penelitian Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Peran Serta Masyarakat Mampu Di Provinsi Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
77.	Pengembangan Pengelolaan Wisata Alam Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2005
78.	Visi Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja)	Balitbang Kota Surabaya	2005
79.	Pendataan PMKS Di Surabaya Pemetaan Problema Dan Pengembangan Program Penanganan Lansia Di Kota Surabaya	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	2005
80.	Penyusunan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bojonegoro	Bappeda Bojonegoro	2005
81.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Sumenep 2006-2011	Bappeda Sumenep	2005
82.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar 2006-2011	Bappeda Blitar	2006
83.			

84.	Pemetaan Keberadaan dan Keadaan Kelompok Masyarakat yang Berhak Mendapatkan Subsidi Pemerintah Dalam Rangka Penerapan Sistem Target Subsidi (Targeting Subsidi) di Jawa Timur	Balitbang Jatim	2006
85.	Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadal) di Kabupaten Blitar	Balitbangda Blitar	2006
86.	Analisis Prioritas Program-Program Kemiskinan di Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2006
87.	Penyusunan Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah di Kabupaten Probolinggo	Bappeda Probolinggo	2006
88.	Kajian Tentang Bentuk-Bentuk Tekanan Kemiskinan dan Mekanisme Survival Keluarga Miskin	Bappeda Jatim	2006
89.	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar 2008-2015	Bappeda Pamekasan	2007
90.	Rasa Aman, Mekanisme Adaptasi masyarakat dan Ekskalasi TindakKejahatan di Propinsi Jawa Timur	Polda Jatim	2007
91.	Pemberdayaan Nelayan Melalui Diversifikasi Usaha di Pantai Prigi, Trenggalek	Balitbang Jatim	2007
92.	Penelitian Kemiskinan di Perkotaan dan Alternatif Kebijakannya	Balitbang Jatim	2007
93.	Penyusunan Program dan Evaluasi Antisipasi Urbanisasi Berlebih di Kota-Kota di Provinsi Jawa Timur	Bappeprop Jatim	2007
94.	Penyusunan Kebijakan dan Program Pemberdayaan UKM di Kabupaten Sumenep	Bappeda Pamekasan	2007

Surabaya, 30 Maret 2009

Karnaji, S.sos. M.Si  
Nip. 132 162 037

### C. Anggota Peneliti

1. Nama lengkap dengan gelar : Listiyono Santoso, S.S. M.Hum.
2. Umur/Jenis Kelamin/Agama : 35 tahun/Laki-laki/Islam
3. Alamat (Bagian, Fakultas dll.) : Universitas Airlangga
4. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/III-b/132262265
5. Jabatan Pokok : Lektor
6. Kesatuan/Perguruan tinggi : Universitas Airlangga
7. Alamat Kantor : Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya
8. Riwayat Pendidikan Tinggi :  
(dalam dan luar negeri)

### A. RWAYAT PENDIDIKAN

No	Macam Pendidikan	Tempat	Tahun		Bidang Spesialis	Titel/Ijazah/Diploma
			Dari	Sampai		
1	S-1 Filsafat UGM	Yogyakarta	1990	1995	Filsafat Sosial	S.S.
2	S-2 Filsafat UGM	Yogyakarta	2001	2003	Filsafat Sosial	M.Hum.

### B. DAFTAR KARYA TULIS

No	Nama Judul Karya Ilmiah (Unsur)	Keterangan
1	2	7
1.	Epistemologi Kiri	Karya ilmiah diterbitkan secara nasional sebagai editor ISBN. 979-3417-10-2
2.	Sains dan Problematika Ketuhanan Abad Pencerahan (Hampiran Empirisme Radikal David Hume, 1711-1776)	Karya ilmiah diterbitkan di "dance of god tarien luhau" Penerbit Apelron Philotas, Cet 1. Oktober 2003 ISBN 979-3424-12-9.
3.	Postmodernisme : Kritik atas Epistemologi Modern	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat MOZAK, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2003, Hal 15-28, ISSN : 1412-999X.
4.	Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid	Karya ilmiah diterbitkan secara nasional sebagai penyunting ISBN. 979-98045-5-8
5.	Kebudayaan Daerah Dalam Proses Akulturasi Studi Kritis Terhadap Asas-asas "Tri-Kor" dan Sari-sari Kebudayaan Nasional IG Hejar Dewantara.	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.3, No. 1, Hal 102-117, ISSN 1411-6383
6.	Bord : Transformasi Musik Klasik Menuju Musik Pop Tinjauan Kajian Budaya	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.3, No. 2, Hal 63-72, ISSN 1411-6383
7.	Epistemologi Politik Pemberdayaan Masyarakat Sipil	Karya ilmiah diterbitkan di Media Komunikasi Pengembangan Masyarakat Madani al-Ijtima', Vol. 5, No. 1, Januari-Juli 2004 Hal. 48-63. ISSN : 1411-1826.
8.	Patologi Humanisme (Modern) : dari Krisis Menuju 'Kematian' Epistemologi Rasional	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal FILSAFAT, Vol. 33, No. 1, Hal. 29-41 Jogjakarta April 2003 ISSN : 0853-1870
9.	Dari komersialisasi sampai Dehumanisasi Pendidikan	Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta "EKSPRES" edisi XV Th. X November 2002.

10.	Wanita dan Kebijakan Pembangunan: Studi Atas Peran Wanita dalam pengambilan Keputusan Publik di Pemkot Surabaya.	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal Penelitian "DINAMIKA SOSIAL", Vol. 5, No. 1, Hal. 24-41, Surabaya April 2004 ISSN : 1411-6383.
11.	Fenomena Kesalahan Berpikir dalam Wacana Sosial Politik Nasional	Karya ilmiah diterbitkan di Jurnal "DINAMIKA SOSIAL", Vol.5, No. 2, Hal 179-194 ISSN 1411-6383
12.	Markobe dan Nalar Hedonis Mahasiswa	Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah "BAKTI" Agustus 2003.
13.	Bedah Buku Membaca (Pikiran) GUS DUR	Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Kedaulatan Rakyat 14 September 2003.
14.	Reproduksi kelas sosial dalam kapitalisasi pendidikan	Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Surabaya News, 11 Agustus 2003.
15.	Anak-anak korban kemiskinan	Hasil Pemikiran di terbitkan di surat kabar Kedaulatan Rakyat, 26 Agustus 2005.
16.	Problem Posing Education: Mengintegrasikan Realitas Sosial ke dalam Pendidikan.	Hasil Pemikiran di terbitkan di Majalah pendidikan GERBANG edisi 6 Tahun III Desember 2003.
17.	Sastra (wan), Nalar Estetik dan Komitmen Sosial	Hasil pemikiran yang disampaikan di Seminar "Jelajah Estetik Sastra dalam Komitmen Sosial" Pada tanggal 4 Mei 2004 di Fakultas Sastra Unair
18.	Remaja, (e)moralitas dan (per) gaul(en) sehat	Hasil pemikiran yang disampaikan di Bedah Buku "Bangkit Dong Sobat" Pada tanggal 3 Maret 2005 di Fakultas FISIP Unair
19.	Orang Miskin, Kemiskinan dan Sekolah Mahal	Hasil pemikiran yang disampaikan di Seminar "Masa Depan Pendidikan Indonesia Pasca Pendidikan Mahal" Pada tanggal 20 September 2003 di Jogjakarta
20.	"Audianing" di Komunitas "Islam Tradisional" (Memaknai Gejolak Liberalisasi Pemikiran Kaum Muda NU)	Hasil pemikiran di sampaikan di bedah buku NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru Karya Laode Ida Tanggal 14 Februari 2004.
21.	Fenomena Kesalahan Berpikir Dalam Wacana Sosial Politik Nasional (Studi Atas Pernyataan-pernyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca Orde Baru)	Hasil penelitian di terbitkan di LEMLIT Unair, dibiayai oleh Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia D/P Nomor: 003/0011/1/-/2002 tanggal 1 Januari 2002 Kontrak Nomor: 023/LIT/BPPK-SDM/IV/2002, Dijen Dikti, Depdiknas Nomor Urut 29, September 2002.
22.	Ketidakadilan Gender dan Pandangan Feminisme Dalam Novel Perempuan Berkabung Sorben Karya Abidah El Khaliky.	Hasil penelitian di terbitkan di LEMLIT Unair, dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. DIP Nomor: 004/0011/1/-/2004 tanggal 3 Januari 2004 Kontrak Nomor: 108/P21PT/DPPM/DM, SKW/II/2004, Dijen Dikti, Depdiknas Nomor Urut 6, Nopember 2004.
23.	Gendrit dan masyarakat tanpa kekerasan	Buku diterbitkan secara nasional ISBN: 979-98045-38-8 sebagai editor
24.	Pendidikan berbasis realitas sosial	Buku diterbitkan secara nasional ISBN: 979-98045-9-2 sebagai penyunting
25.	Tanggung jawab cultural (institusi) Pendidikan	Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Mampukah dunia pendidikan buka dan sahur bersama pada bulan ramadhan" di IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 20 Oktober 2005.
26.	Teologi Politik Gus Dur	Buku diterbitkan oleh Ar Ruz Media tahun 2003 sebagai penulis dengan ISBN 979-3417-21-8
27.	Filsafat Ilmu Sosial	Buku diterbitkan oleh Gema Media, 2003 sebagai penulis dengan ISBN ISBN 979-9552-38-9
28.	Dekonstruksi Ideologi Negara	Buku diterbitkan oleh Nirgrat Society, 2003 sebagai penulis dengan ISBN 979978480-8
29.	Dosen Moyek apa salahnya	Artikel di Harian Jawa Pos, 10 Mei 2006
30.	Komunitas Terpenjara di Metropolis	Artikel di Harian Sore Surabaya Post, 26 Juli 2006
31.	Dan lain-lain	

## C. DAFTAR PENELITIAN

No	THN	JUDUL PENELITIAN	SUMBER BIAYA	KET
1	1999	Tinjauan Filosofis Pendidikan terhadap Konsep Link and Match dalam Upaya Pengembangan SDM	Mandiri	Ketua
2	2000	Hubungan Antara Suku, Agama dan Golongan di Jawa Timur (Parspektif Konflik dan Kerukunan)	Balitbangda Jatim	Anggota
3	2001	Pluralitas dan Kekerasan Massal di Jawa Timur UMR dan Kesejahteraan Sosial Buruh di Jawa Timur	Balitbangda Jatim	Ketua
4	2001	Kebudayaan Daerah dalam Proses Akulturasi (Studi atas Asas-asas Tri-Konseling dan Seri Kebudayaan Daerah IG Hadjar Dewantara)	Dit/Suplemen Unair	Anggota
5	2001	Fenomena Kesalahan Berpikir di Media Massa (Studi atas Penyataan Tokoh dan Pengamat Politik di Media Massa Pasca Orde Baru)	P2IPT/DPPM/Litnud	Ketua
6	2002	Wanita dan Kebijakan Pembangunan (Studi tentang Keterlibatan Wanita dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Pemkot Surabaya)	BBU/Litnud	Ketua
7	2002	Potret Ketimpangan Sosial dalam Teks Sastra Indonesia Mutakhir: Kajian Sosiologi Sastra Terhadap Teks Drama <i>Konglomerat Buris-rawe</i> (N. Riantarno); <i>Sajak Burung-Burung Kondor</i> (Rendra); dan <i>Bento</i> (Iwan Fals)	BBU/Litnud	Anggota
8	2003	Ketidakhadiran Gender dan Pandangan Feminisme dalam Novel <i>Perempuan Berkatung Sorban</i> Karya Abdah El Khaligy	BBU/Litnud	Ketua
9	2004	Reaksi Kreatif Literer Atas Pengusa Orde Baru: Analisis Hegemoni pada Kumpulan Cerpen Soeharto dalam Cerpen Indonesia	BBU/Litnud	Anggota
10	2004	Modal Sosial Demokrasi: Kajian atas Fungsi Folklor dalam Masyarakat Adat Tengger	Hibah RUKK Kementerian Ristek Tahun 1	Ketua
11	2005	Keterlibatan KGI dalam Politik Pilkada di Jawa Timur	Pemprov Jatim	Anggota
		Modal Sosial Demokrasi: Kajian atas Fungsi Folklor dalam Masyarakat Adat Tengger	Hibah RUKK Kementerian Ristek Tahun 2	Ketua

Surabaya, 30 Maret 2009  
 Hormat saya,

Listiyono Santoso

**SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN**

1. **Judul usulan :** *Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar Issue Global Warming, bagi Masyarakat Monolingual Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban*

2. **Ketua Peneliti**

- a) Nama Lengkap : Moch. Jalal, S.S.,M.Hum.  
 b) Bidang Keahlian : Sociolinguistik  
 c) Jabatan Struktural : Ketua Departemen  
 d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
 e) Unit Kerja : Departemen Sastra Indonesia, FIB, Unair  
 f) Alamat Surat : FIB, Unair, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya.  
 g) Telpon/Faks : (031) 5035676 Fax: (031) 5035807  
 h) E-mail : [jalal\\_unair@yahoo.com](mailto:jalal_unair@yahoo.com)

3. **Anggota Peneliti**

NO.	NAMA DAN GELAR AKADEMIK	PANGKAT / GOLONGAN	BIDANG KEAHLIAN	INSTANSI	ALOKASI WAKTU Jam / Mg Bulan	
					8	10
1.	Kamaji, S.Sos.,M.Si.	Lektor Kepala/llld	Sosiologi	FISIP Unair	8	10
2.	Listiyono Santoso, S.S., M.Hum.	Lektor/lllc	Filsafat Sosial	FIB Unair	8	10

4. **Tema Penelitian:** Perubahan iklim, Pelestarian lingkungan, Keaneka-an hayati (biodiversity).

5. **Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)**

- Masyarakat *Monolingual* Sekitar Hutan Di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban
- Kondisi sosial kemasyarakatan yang merupakan potensi program kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah, Perhutani, LSM, dengan masyarakat sekitar hutan dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming* bagi masyarakat *tamping* yang tinggal di sekitar hutan.

6. **Lokasi penelitian :** Kabupaten Bojonegoro dan Tuban



## 7. Hasil yang ditargetkan:

Target dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk dapat menghasilkan program potensial yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming* bagi *masyarakat tamping* yang tinggal di sekitar hutan. Program potensial tersebut merupakan program sinergis antara Perhutani, Pemda, LSM, dan *masyarakat tamping* yang hidup di sekitar hutan, dalam rangka melakukan usaha pelestarian hutan jati dan sekaligus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming*. Pertama, akan dirumuskan berbagai program sinergis yang dianggap potensial. Kedua, akan diidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi potensi serta dianggap menjadi faktor pendukung berbagai program yang direncanakan. Ketiga, akan diidentifikasi pula hal-hal yang dapat dianggap sebagai kendala pelaksanaan program tersebut. Keempat, akan dirumuskan solusi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan program potensial yang direncanakan.

## 8. Institusi lain yang terlibat

Pemda Kabupaten Bojonegoro dan Tuban serta Perhutani wilayah pengelolaan hutan di Kabupaten Bojonegoro dan Tuban.

## 9. Sumber biaya selain Dikti: —

## 10. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Dari hasil penelitian tahap I diketahui bahwa media maupun cara paling efektif yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming* bagi *masyarakat monolingual* yang tinggal di sekitar hutan adalah bukan dalam bentuk sekedar informasi melalui media tertentu maupun sosialisasi saja. Cara yang paling efektif dan terbukti berhasil adalah melalui kegiatan-kegiatan kongkrit yang melibatkan mereka secara langsung dalam aktivitas pelestarian hutan. Sebagai contoh adalah melalui program kemitraan dengan pihak Perhutani dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama.

## 11. Ringkasan

Penelitian yang berjudul "Problematika Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar *Issue Global Warming*, bagi Masyarakat *Monolingual* Sekitar Hutan Di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban" tahun ke-2 ini mencoba menghasilkan program potensial yang dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming* bagi *masyarakat tamping* yang tinggal di sekitar hutan. Program potensial tersebut merupakan program sinergis antara Perhutani, Pemda, LSM, dan *masyarakat tamping* yang hidup di sekitar hutan,

dalam rangka melakukan usaha pelestarian hutan jati dan sekaligus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap *issue* seputar pemeliharaan lingkungan hidup dan *Global Warming*. Pertama, akan dirumuskan berbagai program sinergis yang dianggap potensial. Kedua, akan diidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi potensi serta dianggap menjadi faktor pendukung berbagai program yang direncanakan. Ketiga, akan diidentifikasi pula hal-hal yang dapat dianggap sebagai kendala pelaksanaan program tersebut. Keempat, akan dirumuskan solusi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan program potensial yang direncanakan.

Peneliti akan melakukan pengumpulan data pada kantong-kantong penting di wilayah hutan jati Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Areal hutan jati yang dimaksud meliputi hutan jati produktif maupun areal gundul bekas hutan jati yang saat ini pemeliharannya di bawah pengawasan Dinas Perhutani. Semua data seputar persoalan penelitian ini akan dikumpulkan hingga pada taraf jenuh. Proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan instrumen terstruktur dan wawancara mendalam (*in depth*).

Temuan-temuan riset ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi/rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkompeten, khususnya Institusi Perhutani juga Pemda setempat dalam rangka melestarikan kawasan hutan jati yang saat ini sedang dalam kondisi krisis.